



RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2025 - 2029



 (0292) 421025

 dp3akb_grobogan

 Kompleks Simpang Lima Purwodadi
Kabupaten Grobogan

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah, tujuan, sasaran, serta strategi pelaksanaan pembangunan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis permasalahan, serta identifikasi potensi daerah, sehingga diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang ada, terutama dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta penguatan ketahanan keluarga melalui program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kami menyadari bahwa tersusunnya Renstra ini tidak terlepas dari kerja sama, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak, baik perangkat daerah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, maupun mitra pembangunan lainnya. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Akhirnya, kami berharap Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan, serta dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya Grobogan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Purwodadi, 19 September 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana



Indartuningsih, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum	1-4
1.3 Maksud dan Tujuan	1-8
1.4 Sistematika Penulisan	1-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	2-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	2-38
BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	3-1
3.1 Tujuan Renstra.....	3-1
3.2 Sasaran Renstra	3-2
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan	3-6
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	4-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	4-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	4-48
BAB V PENUTUP	5-1
5.1 Kesimpulan Substansial	5-1
5.2 Kesimpulan Sesuai Kaidah Pelaksanaan.....	5-1
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan.....	5-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-3
Gambar 1.2	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD	1-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi	2-7
Gambar 2.2	Perkembangan IPG Tahun 2020-2024 Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Lain Sekitarnya Tahun 2024	2-16
Gambar 2.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024	2-17
Gambar 2.4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan dengan Wilayah Sekitar Tahun 2024	2-18
Gambar 2.5	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Tahun 2022-2024.....	2-19
Gambar 2.6	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).....	2-20
Gambar 2.7	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).....	2-21
Gambar 2.8	Realisasi Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022-2024	2-23
Gambar 2.9	Realisasi Capaian Persentase Perkawinan Dibawah Umur 19 Tahun Pada Tahun 2022-2024	2-24
Gambar 2.10	Realisasi Capaian Total Fertility Rate Tahun 2022-2024	2-25
Gambar 2.11	Realisasi Capaian ASFR 15-19 Tahun 2022- 2024.....	2-26
Gambar 2.12	Realisasi Capaian Persentase Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2022-2024	2-27
Gambar 2.13	Realisasi Capaian Unmet Need Pada Tahun 2022-2024.....	2-28
Gambar 2.14	Realisasi Capaian Persentase Anggota Kelompok Pembangunan Keluarga Aktif Pada Tahun 2022-2024	2-29
Gambar 2.15	Realisasi Persentase Penurunan Keluarga Pra.....	2-30
Gambar 2.16	Sejahtera Pada Tahun 2022 Sampai Dengan 2024	2-30
Gambar 3.1	Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029	3-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	2-7
Tabel 2.2	Proyeksi ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029	2-9
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Grobogan.....	2-13
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024	2-30
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024	2-32
Tabel 2.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029	2-39
Tabel 2.7	Perumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029	2-41
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029	3-1
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029	3-2
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	4-8
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029	4-26
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	4-47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Renstra menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai penjabaran teknokratis atas visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah, sekaligus pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun.

Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, penyusunan Renstra Tahun 2025–2029 memiliki arti strategis. Hal ini karena isu kesetaraan gender, perlindungan anak, serta penguatan ketahanan keluarga masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan daerah. Fenomena kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan masih ditemukan. Demikian pula, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi anak di ruang publik maupun digital, serta beban ganda perempuan baik di sektor domestik maupun publik menunjukkan perlunya kebijakan daerah yang lebih responsif.

Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi juga membawa implikasi baru, seperti meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online, perubahan struktur keluarga, hingga tekanan sosial-ekonomi yang berpengaruh pada pola pengasuhan anak. Kondisi ini memperkuat urgensi penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana sebagai instrumen yang dapat memastikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan lebih inklusif, berkeadilan gender, ramah anak, serta mampu memperkuat ketahanan keluarga.

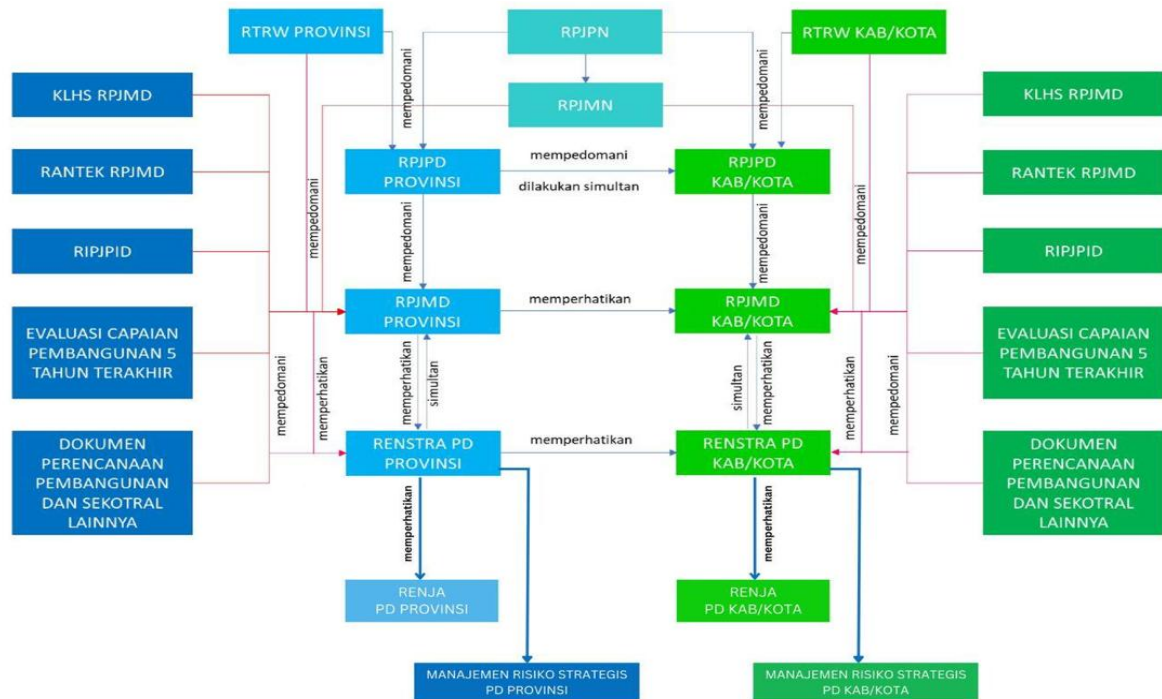
Secara nasional, arah pembangunan Indonesia telah ditegaskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, RPJMN 2025–2029 yang mengusung *Asta Cita*, serta komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya

Tujuan 5 (kesetaraan gender), Tujuan 3 (kesehatan dan kesejahteraan), dan Tujuan 16 (masyarakat damai, inklusif, dan perlindungan anak). Pada tingkat daerah, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029 menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi momentum penting dalam proses demokrasi daerah, karena dari hasil Pilkada inilah lahir kepala daerah yang kemudian menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. RPJMD yang disusun untuk periode lima tahun selanjutnya wajib selaras dengan RPJPD daerah, RPJMN nasional, serta berbagai regulasi pembangunan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, menyusun Renstra sebagai turunan langsung dari RPJMD. Dengan demikian, Renstra menjadi instrumen teknokratis untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah.

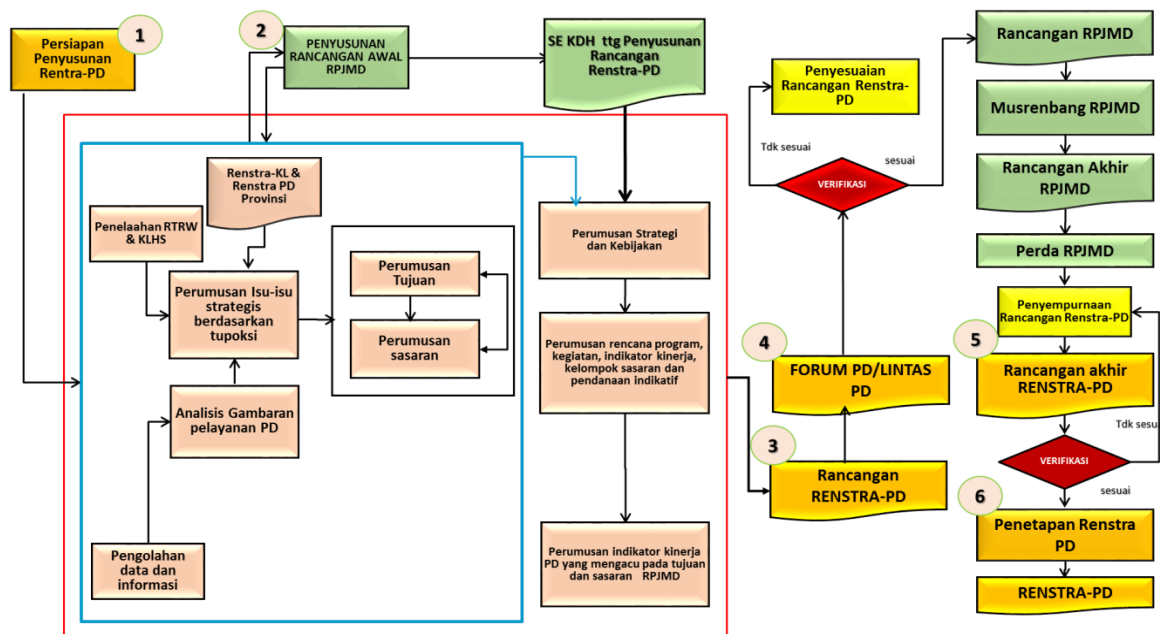
Oleh karena itu, penyusunan Renstra DP3AKB Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta media advokasi kebijakan yang memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, pelaksanaan Forum PD, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Selain itu, proses penyusunan Renstra juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, Renstra Kementerian/Lembaga, serta Renstra Dinas/Badan/Kantor sejenis yang memiliki tugas dan fungsi serupa. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan juga berpedoman pada dokumen RTRW Kabupaten Grobogan serta dokumen KLHS agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi ruang dan lingkungan hidup Kabupaten Grobogan.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.



Gambar 1.2 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

Melalui Renstra ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan diharapkan dapat berperan maksimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memenuhi hak anak, mendorong kesetaraan gender, dan memperkuat ketahanan keluarga, demi terwujudnya Grobogan yang ramah perempuan, layak anak, dan berdaya keluarga.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026), dicabut sebagian dengan UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman atas Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Korban Perdagangan Orang;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui sebagaimana dimutakhirkan terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
29. Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat;
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak
32. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) Tahun 2023-2024;

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016
35. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 25 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5);
39. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029;
4. Digunakan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029.
- Bab II Gambaran Pelayanan**, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, memuat tentang uraian tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan; Kelompok Sasaran Layanan serta Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
- Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan**, memuat tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.
- Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, memuat program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja,

indikator, target, dan pagu indikatif serta target tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup, memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pengkoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretarat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
4. Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan;
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana;
6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. UPTD PPPA dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak Perlindungan Perempuan, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;

- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan

Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan advokasi dan edukasi serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan perempuan dan anak. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penduduk,



penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

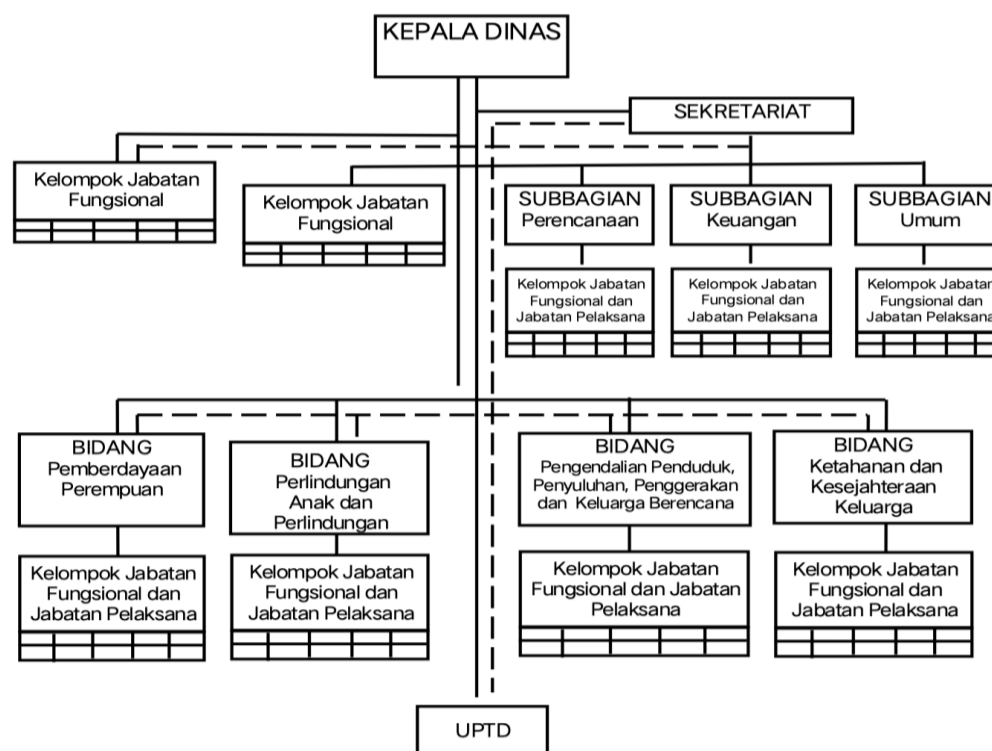
7. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing- masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah Jabatan Fungsional tertentu ditentukan berdasarkan perumpuan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2025 sebagai berikut:



Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor kunci yang tidak dapat diabaikan. Aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki profesionalisme, integritas, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Kapasitas dan kompetensi aparatur bukan hanya menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, analisis terhadap kualitas, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia perangkat daerah menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi. Analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual SDM, sekaligus menjadi dasar perumusan strategi pengembangan aparatur yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi, optimalisasi pelayanan publik, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Berikut jumlah SDN berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.1
Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMP Sederajat	0	0	2	0	2
3	SMA Sederajat	0	0	18	13	31
4	D3	0	2	0	2	4
5	S1	5	6	15	14	40
6	S2	4	6	0	0	10
Jumlah		9	14	36	29	88

Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sampai dengan tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan memiliki 88 pegawai, terdiri atas 45 laki-laki (51%) dan 43 perempuan (49%). Komposisi yang hampir seimbang ini mencerminkan potensi penerapan pengarusutamaan gender yang cukup baik dalam internal organisasi. Sedangkan berdasarkan status kepegawaian, terdapat 23 orang PNS (26%) dan 65 orang Non PNS (74%). Dominasi tenaga Non PNS menunjukkan bahwa keberlangsungan program dan kegiatan organisasi sangat bergantung pada kontribusi pegawai Non PNS. Oleh

karena itu, aspek pengembangan kapasitas, peningkatan kompetensi, dan jaminan kerja bagi pegawai Non PNS menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus.

Dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan S1 sebanyak 40 orang (46%), diikuti SMA/ sederajat 31 orang (35%), S2 sebanyak 10 orang (11%), D3 sebanyak 4 orang (5%), serta SD dan SMP masing-masing 1 dan 2 orang (<3%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, khususnya S1. Namun demikian, keberagaman latar belakang pendidikan mulai dari SD hingga S2 sekaligus menggambarkan adanya variasi kapasitas yang sesuai dengan peran dan kebutuhan tugas masing-masing.

Sampai dengan tahun 2024, jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan tercatat sebanyak 28 orang, terdiri dari PNS, PPPK, dan CPNS. Jumlah ini masih jauh dibawah kebutuhan ideal yang ditetapkan dalam analisis kebutuhan pegawai. Kekurangan ini berdampak pada beban kerja yang cukup besar, mengingat luasnya cakupan urusan yang harus ditangani, mulai dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Memasuki periode perencanaan 2025–2029, kebutuhan pegawai diproyeksikan terus meningkat secara bertahap. Pada tahun 2025 jumlah kebutuhan mencapai 75 orang, kemudian naik menjadi 76 orang pada tahun berikutnya. Tahun 2027 kebutuhan bertambah menjadi 78 orang, lalu meningkat lagi menjadi 80 orang pada tahun 2028, dan menjadi 82 orang pada tahun 2029. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kebutuhan SDM akan terus bertambah seiring dengan semakin kompleksnya program dan target pembangunan daerah yang harus dicapai.

Keterbatasan jumlah pegawai yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi DP3AKB Kabupaten Grobogan. Namun demikian, dengan perencanaan yang baik melalui penambahan formasi pegawai secara bertahap serta peningkatan kapasitas pegawai yang sudah ada, diharapkan kekurangan tersebut dapat diatasi. Langkah ini penting agar pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap berjalan optimal hingga tahun 2029. Berikut tabel proyeksi kebutuhan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.



Tabel 2.2
Proyeksi ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan
Tahun 2025-2029

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan/ABK	Bezetting Pegawai Saat Ini					Proyeksi										Selisih Kebutuhan Pegawai
				CPNS	PNS	PPPK	CASN 2023	Jumlah	Pegawai Pensiun					Pegawai Yang Dibutuhkan					
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
2	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	-3
3	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	-2
4	Sekretaris	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
6	Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
7	Kepala Sub Bagian Umum	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
8	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	1
9	Arsiparis Penyelia	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
10	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
12	Pustakawan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
13	Arsiparis Mahir	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
14	Arsiparis Terampil	6	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Asisten Perpustakaan Terampil	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1



No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan/ABK	Bezetting Pegawai Saat Ini					Proyeksi										Selisih Kebutuhan Pegawai
				CPNS	PNS	PPPK	CASN 2023	Jumlah	Pegawai Pensiun					Pegawai Yang Dibutuhkan					
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
16	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	-2
17	Penata Layanan Operasional	7	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
19	Pengadministrasi Perkantoran	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	-4
20	Operator Layanan Operasional	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	-8
21	Kepala Sub Bagian Keuangan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
22	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	-2
23	Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	-2
24	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
26	Perencana Ahli Pertama	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
27	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
28	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
29	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
30	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	-3
31	Penata Kelola Pemberdayaan	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	-6



No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Kebutuhan/ABK	Bezetting Pegawai Saat Ini					Proyeksi										Selisih Kebutuhan Pegawai
				CPNS	PNS	PPPK	CASN 2023	Jumlah	Pegawai Pensiun					Pegawai Yang Dibutuhkan					
									2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perempuan dan Perlindungan Anak																		
32	Penata Layanan Operasional	7	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Pengelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
34	Pengolah Data dan Informasi	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
35	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dan Perlindungan Perempuan	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
36	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	2	2	2	-1
37	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	-2
38	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	5	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	-3
39	Penata Layanan Operasional	7	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
41	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Keluarga Berencana	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	9	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	3	3	-2



No	Nama Jabatan		Kelas Jabatan	Kebutuhan/ABK	Bezetting Pegawai Saat Ini					Proyeksi										Selisih Kebutuhan Pegawai
					CPNS	PNS	PPPK	CASN 2023	Jumlah	Pegawai Pensiun					Pegawai Yang Dibutuhkan					
										2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Ahli Muda																		
43		Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	8	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	-2
44		Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	-5
45		Penata Layanan Operasional	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
46		Pengadministrasi Perkantoran	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
47		Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
48		Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	8	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	-2
50		Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	-3
51		Penata Layanan Operasional	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	-1
52		Pengolah Data dan Informasi	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	-3
TOTAL				102	3	20	5	0	28	1	1	2	2	2	75	76	78	80	82	-74

Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan tidak hanya bergantung pada peran sumber daya manusia, namun juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan fungsional. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran aktivitas administrasi, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan program dan kegiatan teknis yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan. Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia berada dalam kondisi baik, sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan telah memiliki dukungan fasilitas yang layak untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Grobogan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Alat Angkutan	unit	123	0	123
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	876	0	876
4	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	unit	54	0	54
5	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	unit	8	0	8
6	Alat Laboratorium	unit	89	0	89
7	Alat Komputer	unit	203	0	203
8	Bangunan Gedung	m ²	27	0	27
9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	titik	1	0	1
10	Bahan Perpustakaan	eks	905	0	905
11	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olah Raga	eks	5	0	5

Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2025

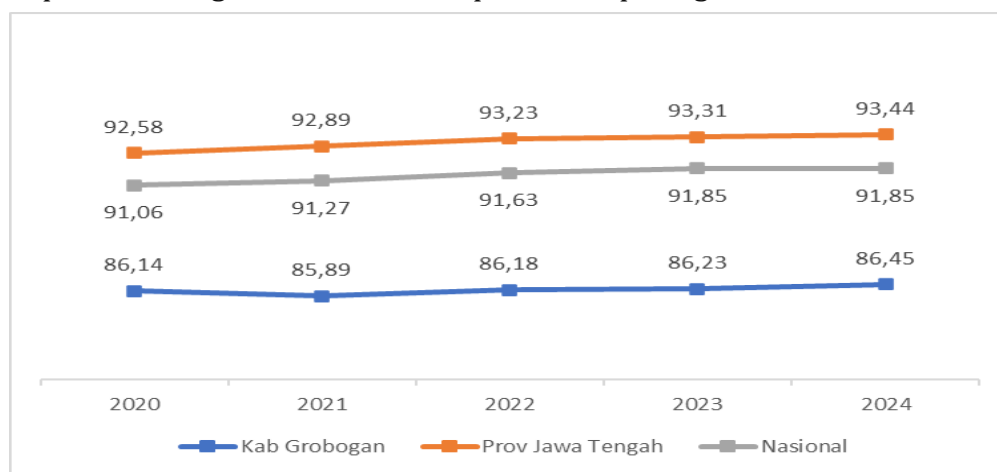
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 2021–2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender, melindungi hak-hak anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga. Berbagai upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi target pembangunan daerah, tetapi juga untuk memperkuat pondasi kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Capaian kinerja yang telah diraih selama periode tersebut menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan sosial, sekaligus

menunjukkan langkah nyata dalam memperbaiki kualitas layanan publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. IPG disusun dari beberapa komponen, antara lain: Kesehatan, Pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur Harapan Hidup mewakili dimensi Kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 IPG Kabupaten Grobogan sebesar 86,14 dan pada tahun 2024 meningkat hingga menjadi 86,23. Namun, jika IPG Kabupaten Grobogan tahun 2024 dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka terpaut jauh. IPG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional lebih unggul dibanding dengan Kabupaten Grobogan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

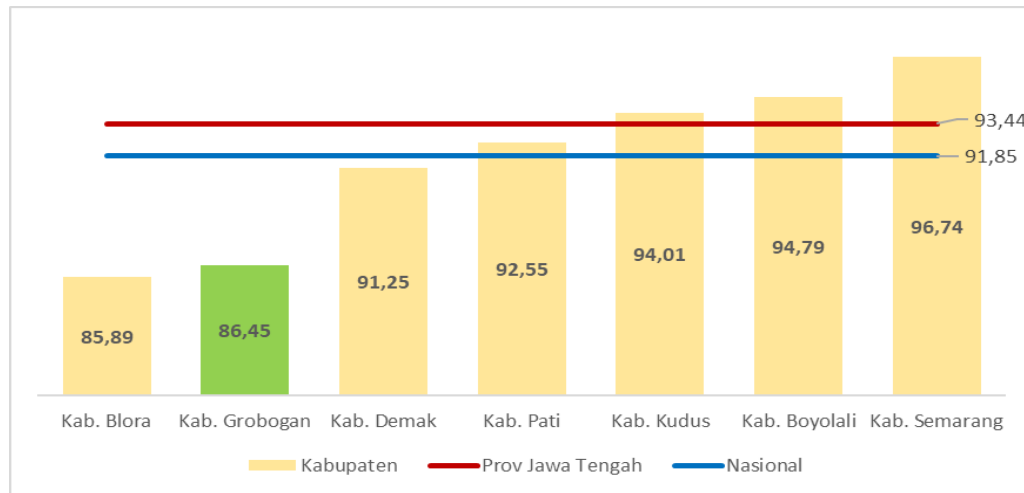


Sumber: BPS Nasional dan Data Long Form SP2020, 2025

Gambar 2.2 Perkembangan IPG Tahun 2020-2024

Perbandingan Nilai IPG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPG terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekati dengan angka 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak pada angka 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki

dan perempuan. IPG pada Kabupaten Grobogan, wilayah sekitar Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



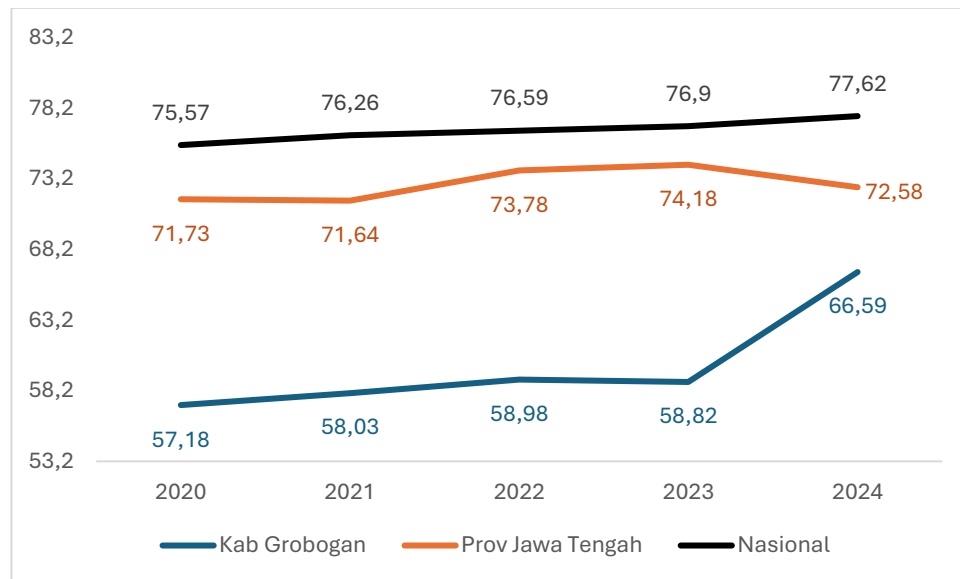
Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2.3 Perbandingan IPG Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Lain Sekitarnya Tahun 2024

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara. IDG merupakan indikator yang penting dalam pembangunan manusia karena berpengaruh terhadap isu kesetaraan gender. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, antara lain keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; serta sumbangan pendapatan.

Nilai IDG pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 memiliki capaian sebesar 57,18 dan tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,59. Jika nilai IDG Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan nilai IDG Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka nilai IDG Nasional dan Provinsi Jawa Tengah lebih unggul, artinya semakin tinggi angka IDG maka semakin tinggi pula tingkat pemberdayaan dan kesetaraan gender di suatu wilayah. Data IDG secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

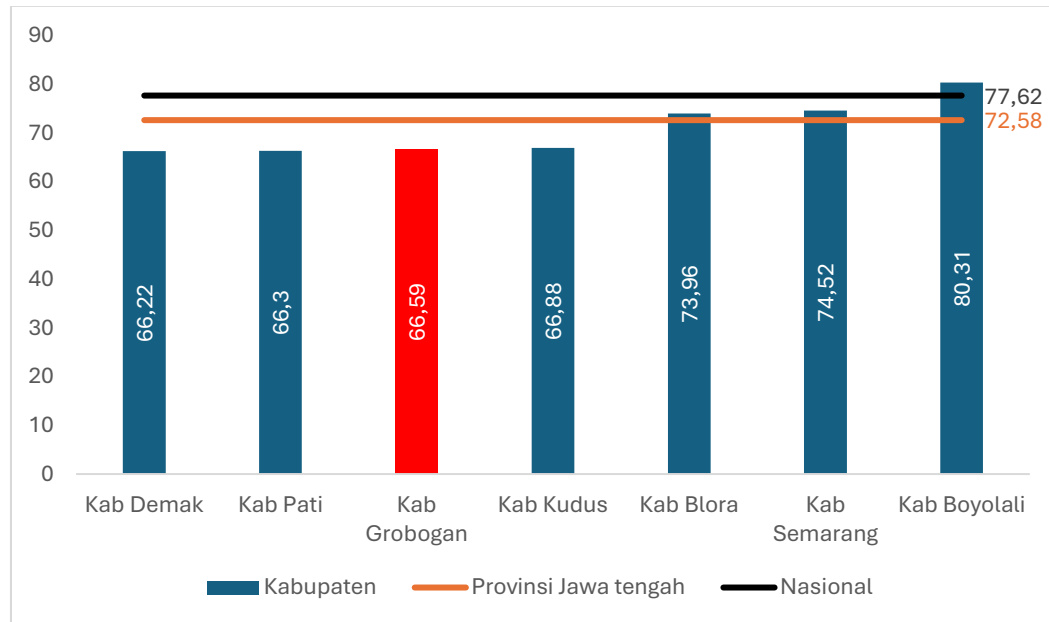


Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2024

Gambar 2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

Perbandingan Nilai IDG Kabupaten Grobogan dengan wilayah sekitar, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IDG terendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan rendahnya nilai IDG tersebut, maka semakin rendah pula tingkat pemberdayaan dan kesejahteraan gender di suatu wilayah. Indeks Pemberdayaan Gender mengukur sejauh mana perempuan memiliki akses yang setara dalam berbagai bidang. Sehingga, nilai yang rendah menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender, dimana perempuan mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses peluang yang setara dengan laki-laki. Hal ini juga bisa menunjukkan adanya diskriminasi atau ketidakadilan dalam hak-hak perempuan di suatu negara atau daerah.

IDG pada Kabupaten Grobogan dan wilayah sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut.

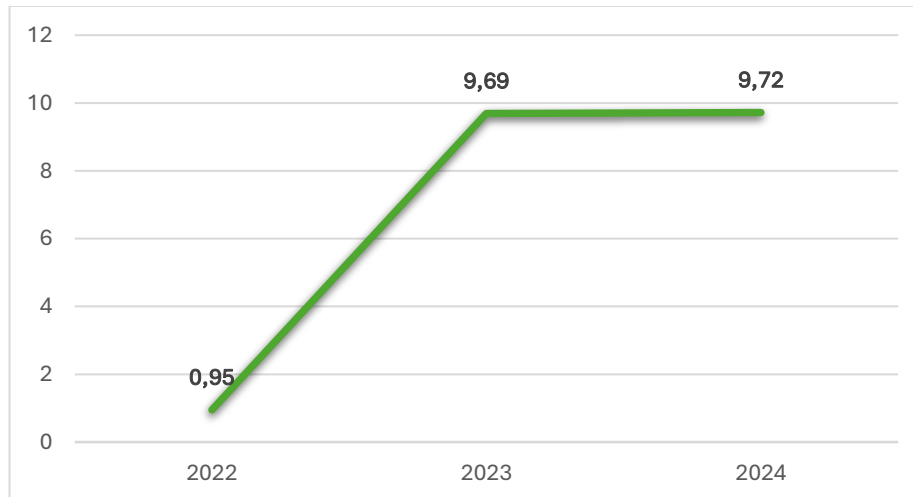


Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan dengan Wilayah Sekitar Tahun 2024

3. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD

Pencapaian ARG digunakan untuk mengukur tingkat komitmen pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, serta untuk mendorong integrasi perspektif gender dalam setiap sektor pembangunan. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD di Kabupaten Grobogan menunjukkan pencapaian yang signifikan. Pada tahun 2022, ARG tercatat sebesar 5,78%, yang menunjukkan capaian yang baik meskipun ada ruang untuk peningkatan. Pada tahun 2023, realisasi ARG meningkat menjadi 6,42%, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam komitmen pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan gender dalam alokasi anggaran. Tahun 2024, angka ini terus meningkat menjadi 9,09%, melampaui angka-angka sebelumnya. Pencapaian tersebut menunjukkan progres yang baik dan mengindikasikan bahwa pemerintah semakin memperhatikan pentingnya respons terhadap gender dalam pengelolaan anggaran.



Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Gambar 2.6 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD Tahun 2022-2024

4. Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait

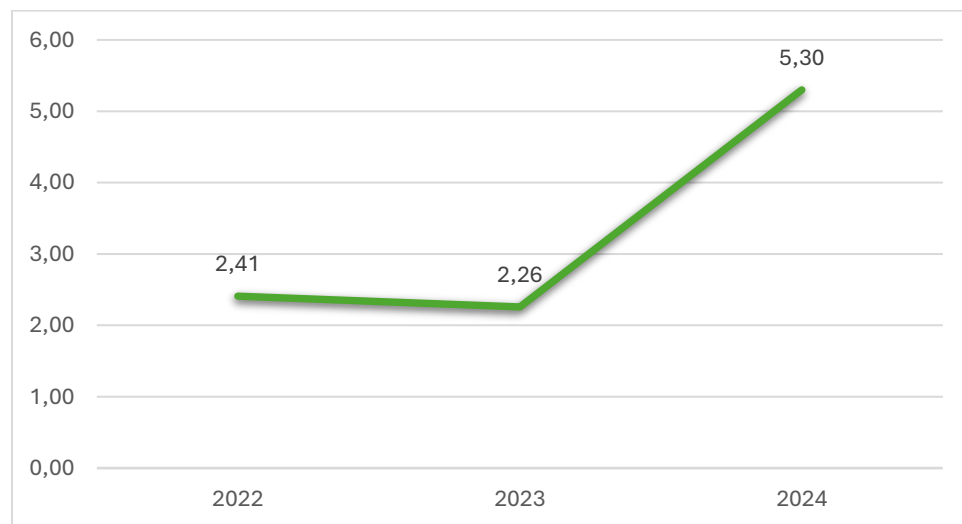
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait menunjukkan capaian terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Realisasi persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, angka penanganan korban kekerasan terhadap anak tercatat 100%, yang menunjukkan komitmen penuh dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Capaian ini dipertahankan pada tahun 2023 dengan angka yang sama, yaitu 100%, yang mencerminkan keberhasilan yang berkelanjutan dalam menangani setiap kasus yang ada. Demikian pula pada 2024, diperkirakan capaian ini tetap 100%, menunjukkan konsistensi dalam pemberian layanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, dengan berbagai langkah perbaikan yang terus dilakukan untuk memperkuat sistem perlindungan yang ada.

Meskipun capaian 100% dalam penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Grobogan sudah sangat baik, tantangan tetap ada dalam mempertahankan hasil tersebut. Kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta kesadaran masyarakat menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Namun, dengan langkah-langkah perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan pencapaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Upaya sinergi antar lembaga dan penguatan kapasitas SDM akan sangat penting untuk mempertahankan keberhasilan ini di masa depan.

5. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), merupakan indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Semakin tinggi angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, menunjukkan adanya masalah serius terkait dengan perlindungan dan kesetaraan gender. Penurunan angka kekerasan menunjukkan keberhasilan kebijakan, pendidikan, serta keberlanjutan layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kabupaten.

Realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 tercatat 2,41 per 100.000 penduduk perempuan, yang menunjukkan angka kekerasan relatif tinggi. Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 2,26 per 100.000 penduduk perempuan, yang menandakan adanya perbaikan meski dalam skala yang tidak terlalu besar. Namun, tahun 2024 menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, yaitu 5,30 per 100.000 penduduk perempuan, yang mengindikasikan lonjakan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Berikut realisasi Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut.



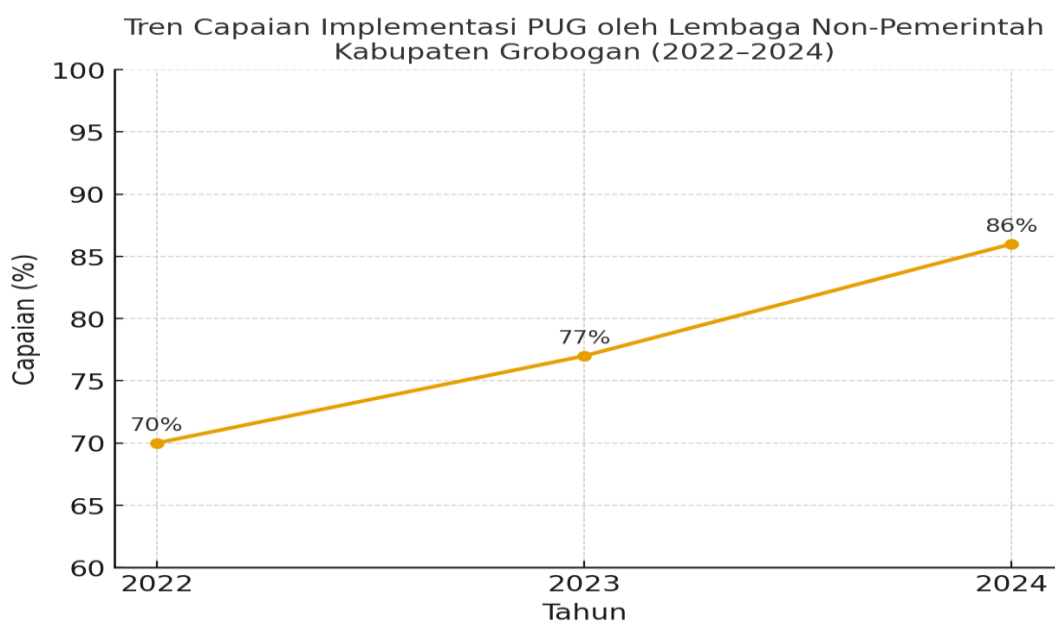
Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Gambar 2.7 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

6. Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG

Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Grobogan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain pendampingan, edukasi, dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Peran lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan PUG sangat penting, karena mampu memperluas jangkauan dan memastikan kesetaraan gender dapat tercapai secara lebih merata. Keterlibatan aktif lembaga-lembaga tersebut juga mendukung upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dalam mengurangi ketimpangan gender serta menjamin akses yang setara bagi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Dari sisi capaian, pada tahun 2022 realisasi implementasi PUG oleh lembaga non-pemerintah tercatat sebesar 70%, kemudian meningkat menjadi 77% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian tersebut mencapai angka tertinggi yaitu 86%, yang tidak hanya menunjukkan peningkatan signifikan, tetapi juga melampaui realisasi tahun-tahun sebelumnya. Tren positif ini mengindikasikan bahwa kapasitas lembaga non-pemerintah dalam melaksanakan program PUG semakin kuat, sekaligus mencerminkan meningkatnya jumlah lembaga yang berpartisipasi aktif dalam mendukung kesetaraan gender. Meskipun demikian, tantangan terkait konsistensi partisipasi aktif lembaga dan masyarakat tetap perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan PUG ke depan semakin optimal.

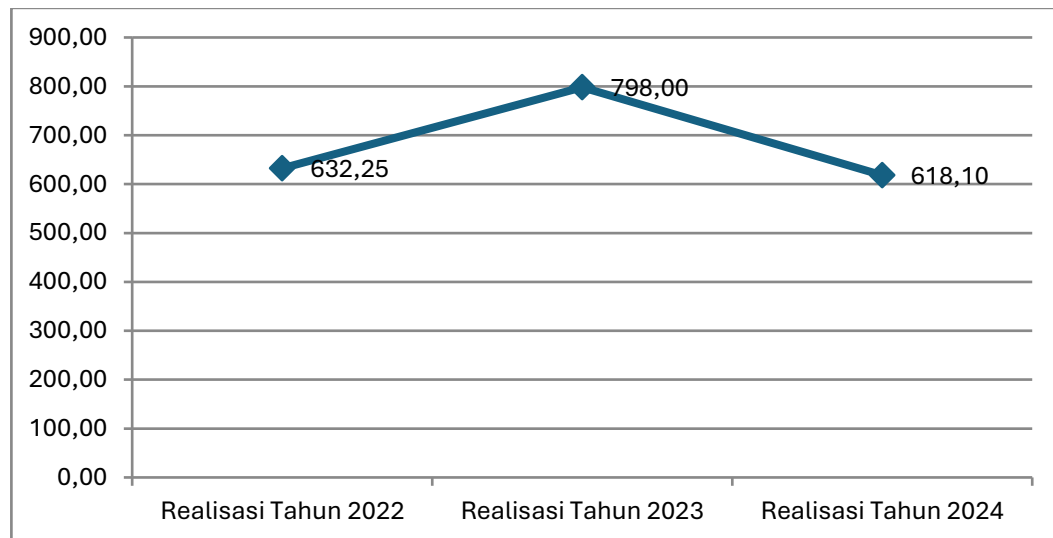


Gambar 2.8 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

7. Capaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) dan Kabupaten Layak Anak (KLA)

Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Kabupaten Grobogan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak melalui pengarusutamaan gender (PUG). Pada tahun 2023, Kabupaten Grobogan berhasil meraih APE kategori Madya, dengan nilai berada pada kisaran 0,6375-0,7724. Predikat ini menunjukkan bahwa Grobogan telah memiliki kelembagaan PUG yang cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya, belum meratanya pemahaman tentang PUG di semua perangkat daerah, serta hambatan budaya yang membatasi partisipasi perempuan di ruang publik. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparatur, serta konsistensi dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender menjadi kunci penting untuk meraih predikat yang lebih tinggi pada periode mendatang.

Sementara itu, capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Grobogan pada periode 2022-2024 berhasil meraih predikat *Madya*, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya kemajuan dalam pemenuhan hak anak, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, seperti ketimpangan akses layanan anak di wilayah perdesaan, keterbatasan sarana ramah anak, serta pengaruh budaya yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender. Untuk meningkatkan capaian ke depan, sinergi antar lembaga, penguatan program perlindungan anak di tingkat desa, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat menjadi langkah yang harus terus diperkuat. Berikut realisasi capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut:

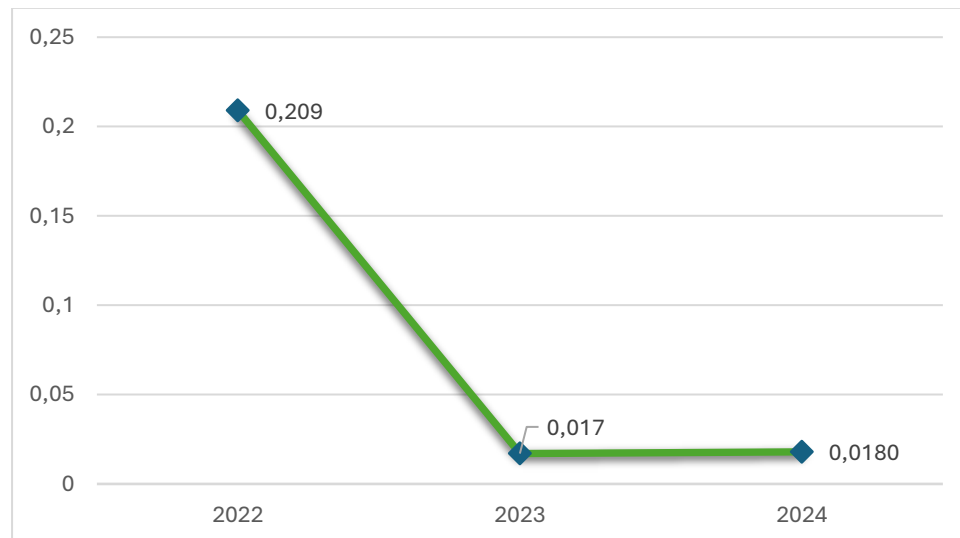


Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Gambar 2.9 Realisasi Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022-2024

8. Persentase Perkawinan Dibawah Umur 19 Tahun

Pernikahan dini merupakan salah satu isu sosial yang memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan anak, terutama perempuan. Di Kabupaten Grobogan, perkawinan di bawah umur menjadi salah satu perhatian utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2022, realisasi persentase perkawinan di bawah umur 19 tahun tercatat 0,209%, yang mencerminkan angka yang sangat tinggi, jauh melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 0,07%. Angka ini menunjukkan masalah serius terkait dengan tingginya angka pernikahan dini di masyarakat yang memerlukan perhatian lebih. Namun, pada tahun 2023, realisasi mengalami penurunan signifikan, turun menjadi 0,017%, yang menunjukkan upaya yang lebih efektif dalam mengurangi angka perkawinan dini. Penurunan ini adalah indikator positif dan memberikan harapan bahwa langkah-langkah yang diambil mulai menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2024, meskipun realisasi tercatat 0,018%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 2023, tetapi masih jauh lebih rendah daripada angka pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa penurunan angka perkawinan dini terus berlanjut, meskipun membutuhkan perhatian lebih mendalam dan pendekatan yang lebih konsisten untuk mempercepat penurunan tersebut. Berikut realisasi capaian persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut:



Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2024

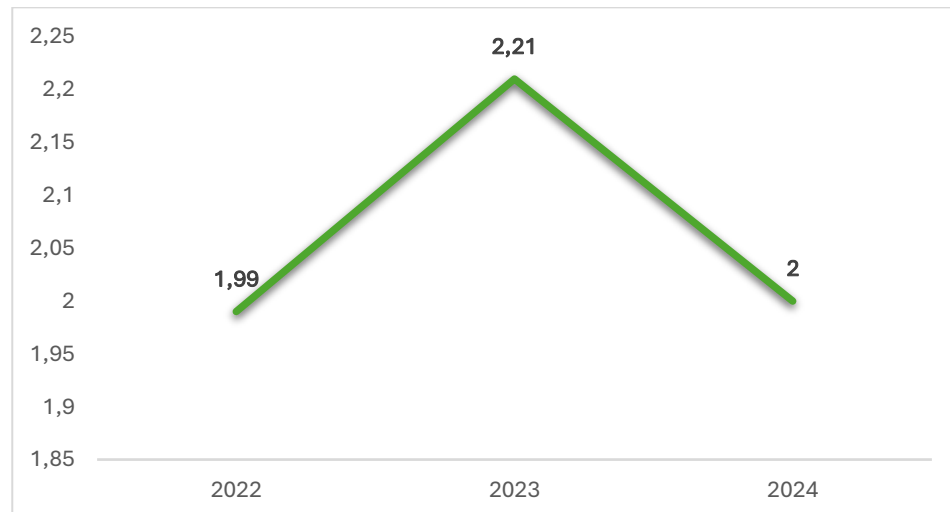
Gambar 2.10 Realisasi Capaian Persentase Perkawinan Dibawah Umur 19 Tahun Pada Tahun 2022-2024

Dari sisi ekonomi, kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi faktor penting dalam tingginya angka perkawinan dini. Beberapa keluarga melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil. Kesadaran sosial yang rendah mengenai dampak jangka panjang dari perkawinan dini, ditambah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada kampanye kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan bahaya dari perkawinan dini, serta peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih merata di seluruh Kabupaten Grobogan.

9. *Total Fertility Rate*

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah indikator penting untuk mengukur tingkat reproduksi dalam suatu wilayah. Penurunan TFR menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan keluarga berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2022, TFR Kabupaten Grobogan tercatat 1,98, yang menunjukkan pengendalian kelahiran yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2023, TFR meningkat menjadi 2,21, yang menunjukkan sedikit kenaikan dalam tingkat kelahiran, meskipun angka ini masih dalam batas yang dapat diterima. Tahun 2024 menunjukkan

penurunan kembali dengan TFR mencapai 2,00, yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian jumlah kelahiran mulai menunjukkan hasil yang positif, meskipun tantangan terkait perilaku sosial dan akses terhadap layanan kesehatan masih tetap ada. yang lebih konsisten untuk mempercepat penurunan tersebut. Berikut realisasi capaian Total Fertility Rate pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari



Sumber: PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2024

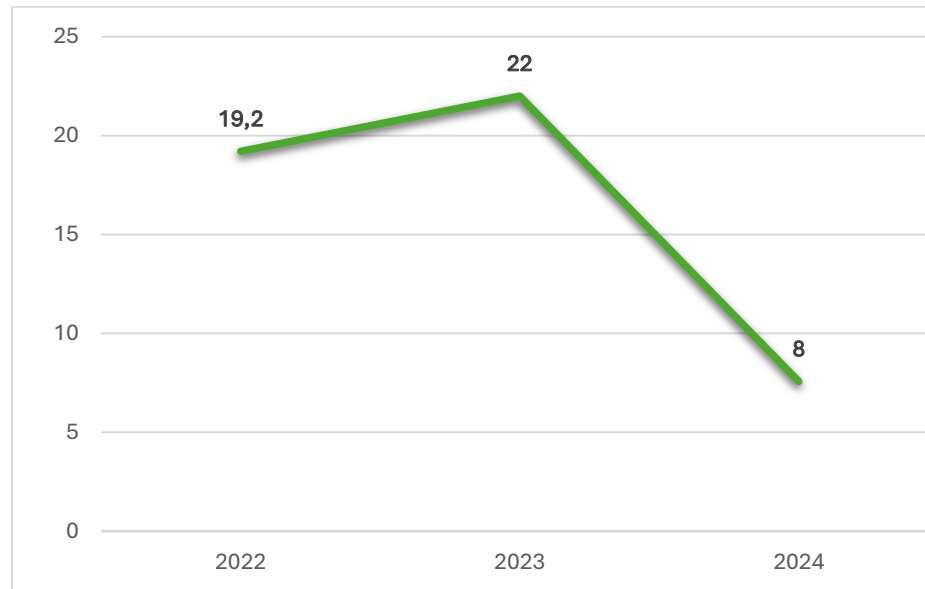
Gambar 2.11 Gambar 2.8 Realisasi Capaian Total Fertility Rate Tahun 2022-2024

10. ASFR 15-19 Tahun

Indikator *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) untuk kelompok umur 15-19 tahun menjadi salah satu parameter penting dalam mengukur perkembangan sosial dan kesehatan perempuan, khususnya terkait dengan jumlah kelahiran pada usia remaja.

Capaian *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) untuk kelompok usia 15-19 tahun menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, ASFR tercatat sebesar 19,20 kelahiran per 1000 PUS, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 22 kelahiran per 1000 PUS, yang merupakan peningkatan sekitar 14,58%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kelahiran pada usia remaja meskipun upaya pengendalian yang dilakukan. Pada tahun 2024, meskipun realisasi ASFR sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023, mencapai 33 kelahiran per 1000 PUS, masih jauh dari target yang diinginkan. Angka ini memperlihatkan adanya upaya yang masih perlu dioptimalkan untuk

mencapai penurunan yang signifikan. Terlepas dari peningkatan angka ASFR pada beberapa tahun terakhir, pencapaian ini tetap menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam program-program pengendalian kelahiran. Berikut realisasi capaian ASFR 15-19 Tahun pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari



Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2024

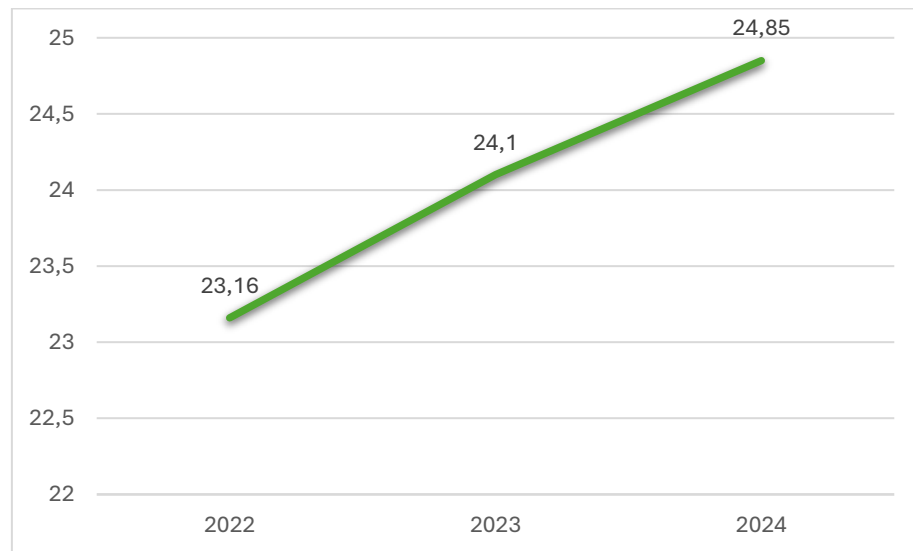
Gambar 2.12 Realisasi Capaian ASFR 15-19 Tahun 2022- 2024

11. Persentase Peserta KB Aktif MKJP

Partisipasi masyarakat dalam program ini sangat penting untuk mencapai tujuan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Program KB aktif MKJP menawarkan metode kontrasepsi yang lebih efektif dan jangka panjang, yang dapat memberikan manfaat besar bagi keluarga, terutama dalam mengurangi angka kelahiran yang tidak terencana, serta mendukung perencanaan keluarga yang lebih baik.

Pada tahun 2022, realisasi untuk persentase peserta KB aktif MKJP tercatat 23,16%, yang menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Di tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 24,1%, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam melibatkan lebih banyak pasangan usia subur dalam program KB aktif MKJP. Peningkatan yang tercatat sebesar 0,94% ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya KB aktif MKJP semakin meningkat. Pada tahun 2024, realisasi tercatat 24,85%, yang menunjukkan peningkatan lebih lanjut meskipun lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pemberdayaan perempuan dan peningkatan akses terhadap kontrasepsi jangka panjang semakin diperhatikan, meskipun masih ada tantangan dalam memperluas partisipasi masyarakat. Berikut realisasi capaian persentase peserta KB Aktif MKJP pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik:



Sumber: Dinas PPPA dan K Kabupaten Grobogan Tahun 2024

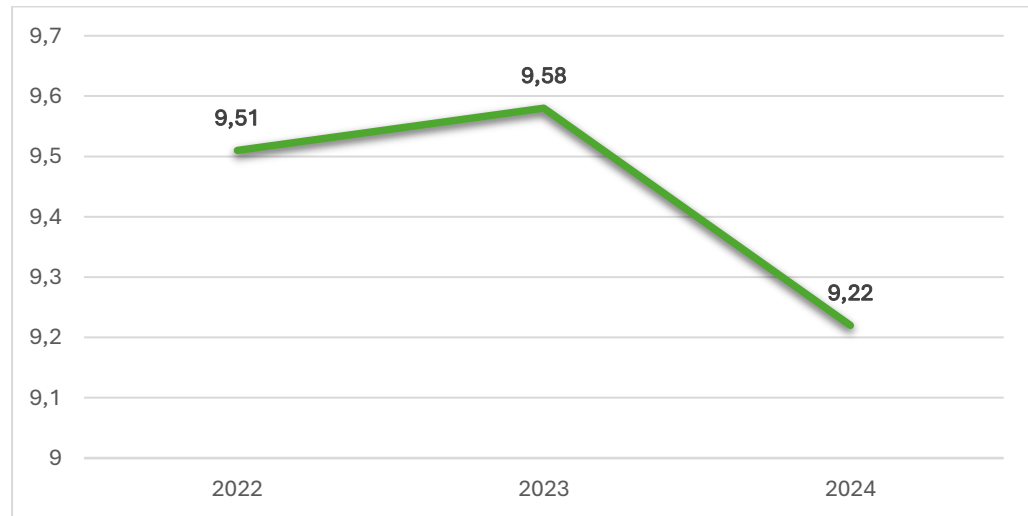
Gambar 2.13 Realisasi Capaian Persentase Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2022-2024

12. Unmet Need

Unmet Need, atau kebutuhan yang belum terpenuhi, merujuk pada jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak mendapatkan akses terhadap layanan keluarga berencana yang mereka butuhkan. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam penilaian kualitas penyelenggaraan program keluarga berencana di Kabupaten Grobogan. Pemenuhan kebutuhan kontrasepsi secara efektif sangat penting untuk menurunkan angka kelahiran yang tidak direncanakan dan membantu dalam perencanaan keluarga yang lebih baik.

Capaian indikator unmet need pada tahun 2022 tercatat sebesar 9,51%. Di tahun 2023, realisasi sedikit meningkat menjadi 9,58%, yang menunjukkan kenaikan kecil sebesar 0,07%. Meskipun demikian, ini masih berada pada tingkat yang cukup stabil. Hal ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan dalam jumlah pasangan yang ingin ber-KB namun tidak mendapatkan akses yang cukup. Dalam konteks ini, meskipun terdapat upaya yang konsisten, tantangan besar terkait akses dan distribusi alat kontrasepsi

di berbagai wilayah di Grobogan masih berlanjut. Berikut realisasi capaian Unmet Need pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik:

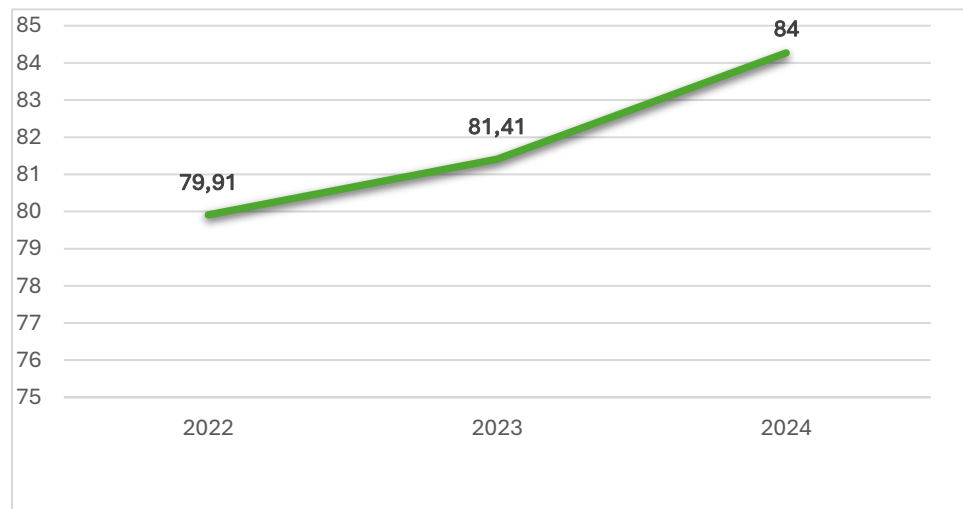


Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Gambar 2.14 Realisasi Capaian Unmet Need Pada Tahun 2022-2024

13. Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB, BKR, BKL)

Pada tahun 2022, realisasi persentase anggota kelompok pembangunan keluarga aktif tercatat 79,91%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah berpartisipasi dalam program ini, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Di tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 81,41%, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya efektivitas dalam pelaksanaan program dan kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam pembangunan. Pada tahun 2024, realisasi kembali meningkat menjadi 84%, yang melampaui pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan kesuksesan dalam memperluas partisipasi anggota kelompok dalam program, yang berperan penting dalam pengembangan kualitas kehidupan keluarga di Kabupaten Grobogan. Berikut realisasi capaian Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat dari grafik berikut.

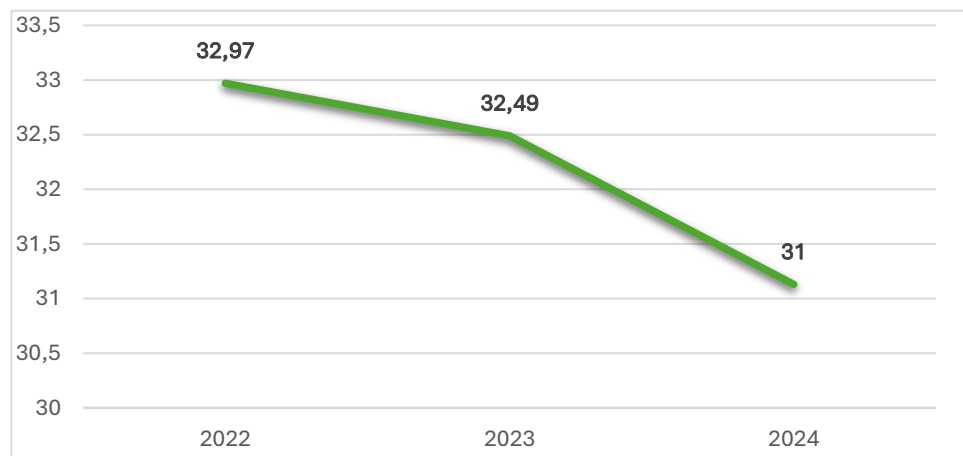


Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Gambar 2.15 Realisasi Capaian Persentase Anggota Kelompok Pembangunan Keluarga Aktif Pada Tahun 2022-2024

14. Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera

Pada tahun 2022, persentase penurunan keluarga pra-sejahtera tercatat sebesar 32,97%, yang menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2023, angka ini sedikit menurun menjadi 32,49%, menunjukkan progres dalam penurunan jumlah keluarga pra-sejahtera. Meskipun penurunannya tidak signifikan, capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil, meskipun ada tantangan yang harus terus dihadapi. Pada 2024, meskipun target penurunan mencapai 32,5%, realisasi kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 32,49%, yang menandakan upaya yang lebih konsisten namun perlu perhatian lebih besar untuk meningkatkan efektivitas program. Berikut realisasi persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas PPPA dan KB Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Gambar 2.16 Realisasi Persentase Penurunan Keluarga Pra Sejahtera Pada Tahun 2022 Sampai Dengan 2024



Tabel 2.4
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	PUG			0,95	0,96	0,97	0,98	0,99		0,95	2,14	9,09		100	222,92	937,11
1.1	Capaian Level APE	Predikat		Madya	Madya	Madya	Madya	Madya		Madya	Madya	Madya		100	100	100
	Persentase lembaga Non Pemerintah Aktif melaksanakan PUG72	%		80,00	72,00	84	84	84		70,000	77,00	85,71		0,00	107,14	102,04
	Kotribusi perempuan di lembaga pemerintah	%		51,20	53,00	60	51,58	52		53,68	59,60	61,72		0,00	112,45	102,87
1.2	Prosentase perkawinan dibawah umur 19 tahun	%		0,0700	0,0052	0,0505	0,064	0,061		0,2090	0,0017	0,01802		-0,99	167,31	165
	Tingkat Capaian KLA/Indeks PUHA	Skor		Madya	Madya	Madya	Madya (601-700)	Madya (632,25)		Madya	Madya	Madya		100	100	100
	Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%		100	100	100	100	100		100	100	100		100	100	100



No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
2	TFR			2,2	2,25	2,19	2,18	2,16		1,99	2,21	2,00		109,55	101,78	108,68
2.1	ASFR 15 - 19	Angka		13,00	47,00	18,8%	18,4	18		19,2	22,00	7,57%		52,32	153,9	159,73
	Prosentase Peserta KB Aktif MKJP	%		23,00	23,50	24,5%	24,5	25		23,16	24,10	24,85		0,00	102,55	101,43
	Unmet Need	%		10,84	9,40	9,5%	9,81	9,5		9,51	9,58	9,22		112,27	98,08	102,95
2.2	Prosentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB, BKR,BKL dan UPPKS)	%		82,00	82,00	84%	85	86		79,91	81,41	84,27%		97,45	99,29	100,32
	Prosentase penurunan kelurga Pra Sejahtera	%		32,50	32,50	31,50%	31	30,5		32,97	32,49	31,13%		0,00	100,03	101,17
3	Nilai evaluasi SAKIP PD	Skor		B (65)	B (68)	BB(70)	BB (72)	BB (73,5)		B (68.00)	B (64.25)	BB (75)		104,62	94,49	107,14
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Skor		B (76.70)	B (76.70)	B (77.7)	B (78,20)	B (79,70)		B (76.14)	B (77.48)	B (77,78)		99,27	101,02	100,10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, data diolah Tahun 2025

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		655.492.950	462.015.050	591.588.200.00	461.659.359	467.102.323		642.747.365	456.905.050	587.341.600.00		98,06	99	99
2	Program Perlindungan Perempuan		20.079.900	10.361.250		19.702.888	19.935.185		19.419.900	9.021.250			96,71	87	
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		33.714.500	225.000.050	92.101.000.00	33.081.490	33.471.521		33.164.500	223.840.050	90.429.000.00		98,37	99	98
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		49.996.750	24.999.850	37.000.000.00	49.058.030	49.636.425		48.396.750	24.403.000	36.650.000.00		96,8	98	99
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		121.580.000	166.189.450	296.892.700.00	119.297.263	120.703.777		118.720.000	160.901.250	279.481.600.00		97,65	97	94
6	Program Perlindungan Khusus Anak					1.044.356.589	1.056.669.553								
7	Program Pengendalian Penduduk		299.580.350	1.482.139.850	514.404.200.00	145.594.420	147.310.977		256.896.450	1.446.236.350	501.688.100.00		85,75	98	98
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		5.531.577.949	6.242.186.250	5.673.352.100.00	12.192.888.627	12.336.642.784		5.096.439.320	5.939.682.989	5.646.951.654.00		92,13	95	100
9	Program		7.404.799.850	7.776.540.000	7.678.792.000.00	606.053.103	613.198.479		4.940.971.850	7.557.474.500	7.678.792.000.00		66,73	97	99



No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)														
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.888.455.551	3.857.776.000	2.267.300.800.00	5.498.024.573	5.562.846.283		5.794.113.586	3.714.153.299.0	2.045.588.818.00		98,4	96	90
			99.750.200	2.276.208.250	4.459.339.000.00				98.181.200	2.189.054.773.0	4.123.116.494.00		98,43	96	92
				28.711.000.00	3.450.000.00					27.535.000.0	3.394.750.00			96	98

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, data diolah 2025

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan memiliki kelompok sasaran yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Berdasarkan karakteristik dan kondisi sosial yang ada di masyarakat, kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dikelompokkan sebagai berikut:

1. **Perempuan dan Anak**

Kelompok ini mencakup perempuan kepala keluarga, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan penyandang disabilitas, serta eks pekerja migran. Mereka merupakan kelompok rentan terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Intervensi ditujukan untuk meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan kelompok ini.

2. **Keluarga Berisiko Stunting**

Keluarga yang memiliki anak berisiko stunting memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal gizi, kesehatan reproduksi, dan pengasuhan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana melakukan pendampingan kepada keluarga untuk mencegah dan mengurangi risiko stunting melalui edukasi dan pelayanan terpadu.

3. **Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan:**

P2TP2A memberikan layanan pengaduan, konseling, dan pendampingan bagi korban kekerasan. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berfungsi sebagai pusat layanan teknis di daerah.

4. **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan**

Menedukasi siswa dan masyarakat tentang kesetaraan gender, hak anak, kesehatan reproduksi, dan pencegahan kekerasan melalui program pelatihan dan kurikulum sekolah.

5. **Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial**

Melibatkan LSM, forum anak, dan kelompok perempuan untuk menjalankan advokasi, sosialisasi, dan pendampingan di masyarakat terkait isu perempuan, anak, dan keluarga.

6. **Lembaga Keagamaan**

Melibatkan tokoh agama untuk mensosialisasikan nilai-nilai perlindungan anak dan perempuan, kesehatan reproduksi, serta pentingnya perencanaan keluarga melalui pendekatan berbasis agama.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Berikut adalah mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Grobogan dalam pemberian pelayanan berdasarkan berbagai perangkat daerah yang terlibat dalam program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana:

1. Pengadilan Agama Purwodadi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Purwodadi dalam hal Pertukaran Data dan Informasi Pemenuhan Hak Perempuan, Perlindungan Anak Pasca Perceraian dan Dispensasi Kawin. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Tanggal Dua belas Desember 2022, Nomor W11-A3/5517/HM.01.1/XII/2022 dan 09.5/2685/2022 dengan jangka waktu selama 3 tahun. Adapun kerjasama meliputi:

- a. Pertukaran data perceraian dengan muatan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht*);
- b. Informasi pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan pemeliharaan (*Hadhanah*) anak pasca perceraian di Pengadilan;
- c. Pertukaran data dispensasi kawin.

2. RSUD Ki Ageng Selo Wirosari

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan melakukan kerjasama dengan RSUD Ki Ageng Selo dalam Pelayanan KB IUD dan Implant yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 476/001/2024 dan 100.3.7/19/rsudwrs/2024 tertanggal Dua Januari 2024;

3. Dinas Pendidikan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Remaja sebagai upaya meningkatkan peran serta orang tua, guru, dan masyarakat dalam mendampingi tumbuh kembang remaja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi yang sehat antara orang tua dan remaja, pencegahan perilaku berisiko, serta penguatan nilai-nilai karakter positif pada generasi muda. Kegiatan ini dilakukan di sekolah tingkat menengah ke atas di Kabupaten Grobogan seperti di SMA N 1 Purwodadi, SMK N 1 Purwodadi dan sebagainya.

4. Dinas Kesehatan, dalam penyediaan layanan kesehatan reproduksi untuk perempuan dan anak, termasuk pelayanan KB (Keluarga Berencana), serta promosi kesehatan terkait pencegahan perkawinan dini.
5. Dinas Sosial, sebagai mitra dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemberdayaan keluarga miskin dan rentan melalui berbagai program sosial.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program desa mandiri, pelatihan keterampilan, serta penguatan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melibatkan perempuan, termasuk program pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis produk lokal dan kerajinan tangan.
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam pemberian layanan administrasi kependudukan bagi perempuan dan anak, serta pelaksanaan pendaftaran perkawinan yang sah dan penguatan hak-hak keluarga di dalam sistem administrasi kependudukan.
9. Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
DP3AKB Kabupaten Grobogan menjalin kerjasama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebagai mitra strategis dalam mendukung program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga. Kerjasama ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, edukasi, dan pemberdayaan, salah satunya adalah program Peningkatan Kesejahteraan Lansia berupa pemberian bantuan sembako bagi lansia di Kecamatan Klambu.
Melalui sinergi ini, GOW berperan aktif dalam memperluas jangkauan program pemerintah daerah hingga ke tingkat kecamatan dan desa, sehingga manfaat program dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan GOW juga memperkuat peran organisasi perempuan dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesetaraan gender, perlindungan anak, serta kepedulian terhadap kelompok rentan.
10. Kepolisian dan Kejaksaan, dalam penegakan hukum terkait perlindungan perempuan dan anak, serta menangani kasus kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual.

2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja

Selama kurun waktu 2021-2025 belum ada dukungan BUMD untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

2.1.7. Kerjasama Daerah Dalam Pencapaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan saat ini belum melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan memegang peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan setara melalui berbagai program peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak, serta penguatan ketahanan keluarga. Namun, hasil evaluasi kinerja menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Salah satu masalah yang paling menonjol adalah belum optimalnya sistem perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Meskipun beberapa indikator kinerja menunjukkan tren yang positif, kenyataannya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Grobogan masih cukup tinggi. Hal ini menandakan bahwa sistem perlindungan yang ada belum sepenuhnya berjalan efektif. Tidak semua korban mampu mengakses layanan yang komprehensif, mulai dari proses pelaporan, pendampingan hukum, layanan kesehatan, hingga pemulihan psikososial. Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, serta minimnya fasilitas layanan terpadu yang mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap layanan publik.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah masih tingginya angka perkawinan anak, terutama di wilayah pedesaan. Penurunan median usia kawin pertama perempuan menunjukkan masih kuatnya tekanan sosial dan budaya yang mendukung praktik tersebut. Permasalahan ini diperparah oleh minimnya akses remaja terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan regulasi di tingkat lokal. Meskipun pemerintah pusat telah menargetkan eliminasi perkawinan anak dalam

RPJMN, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi hambatan yang cukup kompleks, baik dari sisi teknis maupun sosial.

Di sisi lain, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan belum optimal, tercermin dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan yang masih di bawah rata-rata nasional. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun organisasi kemasyarakatan, menjadi tantangan dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan gender. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender (PUG) di Grobogan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Dalam sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana, angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Grobogan masih tergolong cukup rendah. Tingkat pemakaian MKJP yang hanya mencapai sekitar 13,87% dari total akseptor mengindikasikan perlunya pendekatan edukatif dan pelayanan yang lebih efektif. Banyak masyarakat yang masih memiliki persepsi negatif terhadap metode kontrasepsi jangka panjang, disertai keterbatasan petugas yang memiliki kompetensi dalam pelayanan MKJP di lapangan. Hal ini berdampak pada rendahnya keberlanjutan program keluarga berencana yang menjadi salah satu fondasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Permasalahan lainnya yang juga cukup mendasar adalah rendahnya jumlah kebijakan daerah yang responsif gender. Meskipun struktur kelembagaan pengarusutamaan gender telah terbentuk, namun pada praktiknya belum banyak kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan analisis gender secara mendalam. Kurangnya kapasitas aparatur dalam melakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), serta belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, menjadi faktor penghambat dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

Terakhir, masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan layanan ramah anak di tingkat komunitas. Banyak wilayah, khususnya desa dan kelurahan, yang belum memiliki sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, seperti Forum Anak atau Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya ruang aman dan partisipatif bagi anak untuk berkembang secara optimal. Lemahnya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan

sektor pendidikan dalam hal perlindungan anak menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum dan pengambilan keputusan	- Perempuan masih menghadapi hambatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang setara. - Partisipasi perempuan dalam jabatan publik atau posisi strategis masih belum optimal. - Kesenjangan ekonomi berbasis gender masih terjadi, terutama di sektor informal dan pedesaan. - Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) belum berjalan merata di seluruh perangkat daerah.	- Norma budaya yang masih membatasi peran perempuan di ruang publik. - Kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang pentingnya PUG. - Belum optimalnya dukungan program pemberdayaan perempuan yang berbasis potensi lokal. - Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam mendorong kesetaraan gender.
Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	- Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual; - Masih terjadi perkawinan usia anak. - Belum semua anak memperoleh akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. - Sistem layanan perlindungan anak belum terpadu (pelaporan, pendampingan, pemulihan). - Pelibatan dan partisipasi anak dalam pembangunan daerah masih kurang.	- Kurangnya pemahaman dan kesadaran keluarga serta masyarakat tentang hak anak. - Faktor ekonomi keluarga yang mendorong anak putus sekolah atau bekerja di usia dini. - Budaya yang masih memperbolehkan perkawinan usia anak. - Keterbatasan tenaga pendamping dan fasilitas layanan ramah anak di seluruh wilayah. - Koordinasi lintas sektor dalam perlindungan anak belum optimal.
Belum optimalnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	- Pertumbuhan penduduk masih tinggi di wilayah tertentu. - Kualitas data kependudukan untuk perencanaan pembangunan belum maksimal; - Angka perkawinan usia anak memengaruhi tingginya angka kelahiran; - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan kependudukan masih perlu ditingkatkan; - Data dan informasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan.	- Kurangnya literasi masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk. - Faktor budaya/pernikahan dini yang mendorong tingginya angka kelahiran. - Keterbatasan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk. - Sistem pendataan kependudukan belum terintegrasi optimal; - Keterbatasan jumlah, kapasitas, dan distribusi tenaga penyuluh KB/PKB di tingkat desa/kelurahan; - Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan serta pergerakan masyarakat masih terbatas;

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan program KB untuk mendukung ketahanan dan kualitas keluarga	- Partisipasi pria dalam program KB masih rendah; - Akses layanan KB masih timpang, terutama di pedesaan/daerah terpencil; - Layanan KB belum sepenuhnya terintegrasi dengan layanan kesehatan dasar; - Rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga; - Belum optimalnya partisipasi keluarga dalam program Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA).	- Kurangnya literasi tentang kesehatan reproduksi dan manfaat KB; - Keterbatasan tenaga penyuluh KB dan kader di tingkat desa. - Kurangnya fasilitas dan ketersediaan alat/obat kontrasepsi yang mudah dijangkau; - Faktor budaya dan agama yang memengaruhi pola pikir tentang KB. - Sinergi antar sektor (pendidikan, kesehatan, agama) dalam mendukung KB belum optimal.

Sumber : Hasil Analisis, 2025

2.2.2. Isu strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan memiliki peran sentral dalam melaksanakan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Grobogan. Meskipun telah mencapai berbagai pencapaian dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan masih menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam periode perencanaan mendatang. Isu-isu ini berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, perkawinan anak, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan gender mainstreaming dalam pembangunan daerah. Setiap isu ini memiliki dampak besar pada keberhasilan pembangunan sosial dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak di Grobogan.

Tabel 2.7
Perumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional Jawa Tengah	
- Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG); - Ketersediaan kelembagaan PUG di perangkat daerah (DP3AKB) sebagai penggerak integrasi perspektif gender dalam pembangunan. - Keberadaan organisasi perempuan (PKK, GOW), posyandu, karang taruna, kelompok UMKM perempuan, serta komunitas pemerhati anak sebagai mitra strategis pemerintah daerah; - Peluang untuk meningkatkan status Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan dukungan Forum Anak, partisipasi multipihak,	- Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Perangkat Daerah belum optimal; - Norma budaya dan sosial masih membatasi peran perempuan di ruang publik. - Sinergi lintas sektor dan dunia usaha dalam mendukung pemberdayaan perempuan belum kuat. - Kasus kekerasan terhadap anak (fisik, psikis, dan seksual) masih ditemukan - Perkawinan usia anak masih terjadi dan berdampak pada kualitas generasi muda. - Layanan	- Ketidaksetaraan Gender yang masih menjadi tantangan dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik. - Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat, termasuk kekerasan berbasis daring (<i>cyber violence</i>). - Perkawinan usia anak yang masih tinggi di berbagai negara berkembang, berdampak pada kualitas generasi mendatang. - Pemenuhan hak anak dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi serta perdagangan anak. - Agenda SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) khususnya Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 16	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. - Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. - Tingkat perkawinan anak yang masih cukup tinggi di berbagai daerah, berdampak pada stunting dan putus sekolah. - Rendahnya partisipasi perempuan di sektor strategis, termasuk politik, kepemimpinan publik, dan ekonomi	- Jawa Tengah termasuk provinsi dengan angka perkawinan usia anak yang tinggi, terutama di wilayah pedesaan. - Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup banyak dilaporkan, dengan variasi bentuk mulai dari fisik, psikis, hingga online. - Ketimpangan akses ekonomi perempuan, di mana mayoritas perempuan bekerja di sektor informal/UMKM dengan keterbatasan akses modal dan pelatihan. - Upaya mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) yang menuntut keterlibatan kabupaten/kota termasuk Grobogan. - Budaya patriarki yang	- Belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah, dilihat dari rendahnya partisipasi perempuan di sektor strategis serta belum maksimalnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). - Tingginya kasus kekerasan dan perkawinan usia anak, dengan sistem perlindungan dan layanan terpadu yang masih terbatas sehingga belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak.

Potensi Daerah	Permasalahan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional Jawa Tengah	
dan penguatan kebijakan; Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup memadai untuk menunjang peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, termasuk pencegahan perkawinan usia anak dan penurunan stunting.	perlindungan anak (pelaporan, pendampingan, pemulihan) belum terpadu dan menyeluruh. Partisipasi anak dalam pembangunan melalui forum anak dan wadah lainnya masih terbatas.	(Institusi yang damai, adil, dan inklusif).	formal. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang belum merata di seluruh perangkat daerah.	masih kuat memengaruhi peran dan partisipasi perempuan di ruang publik.	
- Jaringan pelayanan KB cukup luas, dengan dukungan fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu, bidan desa) yang tersebar hingga ke pedesaan. - Kader KB, PKK, dan tenaga penyuluh lapangan tersedia dan dapat menjadi mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat. - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dan perencanaan	- Angka kelahiran dan perkawinan usia muda masih cukup tinggi, berdampak pada peningkatan risiko stunting dan putus sekolah; - Keterbatasan tenaga penyuluh KB dan kader lapangan, sehingga pendampingan keluarga belum optimal; - Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terkait	- Pertumbuhan penduduk dunia yang masih Tinggi, berpotensi menimbulkan tekanan pada sumber daya alam, pangan, energi, dan lingkungan. - Bonus Demografi dan Perubahan Struktur Usia - Urbanisasi dan Migrasi Global, mendorong peningkatan kepadatan perkotaan serta tantangan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja). - Perubahan Iklim dan Kesehatan Reproduksi, isu	- Pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi - Perkawinan usia anak dan stunting masih menjadi persoalan serius yang berimplikasi pada kualitas penduduk dan kesehatan ibu-anak. - Indonesia tengah memasuki era bonus demografi, sehingga program KB diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, bukan hanya	- Jateng merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar (sekitar 37 juta jiwa), distribusi tidak merata, dengan kepadatan tinggi di wilayah perkotaan dan aglomerasi. - Perkawinan Anak dan Kesehatan Reproduksi Remaja masih banyak terjadi - Ketimpangan Kualitas Layanan KB, akses dan kualitas pelayanan KB di perkotaan relatif	- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan angka perkawinan usia muda, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia serta risiko stunting; - Belum optimalnya pelayanan dan partisipasi program KB, akibat keterbatasan tenaga, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran



Potensi Daerah	Permasalahan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional Jawa Tengah	
keluarga semakin meningkat, terutama di kalangan pasangan usia subur. Dukungan program nasional (seperti BKKBN) memberikan peluang besar untuk memperkuat program pengendalian penduduk dan KB di daerah.	pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.	lingkungan berpengaruh pada kesehatan reproduksi dan kualitas hidup keluarga.	pengendalian kelahiran. - Masih ada ketidakmerataan layanan terutama di wilayah pedesaan dan kelompok rentan. - Transformasi Program KB menjadi Bangsa Kencana .	lebih baik dibandingkan daerah pedesaan/terpencil. Masih cukup banyak keluarga prasejahtera, sehingga KB harus dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan.	masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi bupati dan wakil bupati Kabupaten Grobogan, yang mana visi tersebut ***“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”*** dan memiliki misi sebagai berikut:

1. Memperkuat pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan;
2. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya;
4. Membangun infrastruktur yang andal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.

Misi yang memiliki kaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan adalah misi ketiga (ke-3) ***“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya”***. Adapun Tujuan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yang memiliki kaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu Pada Tujuan ke-2 ***“Meningkatnya daya saing SDM dan Menurunnya Kemiskinan.”***, serta Sasaran daerah yang terkait adalah ***“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”*** dan ***“Meningkatnya Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan”***.

3.1. Tujuan Renstra

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan merupakan penjabaran dari misi organisasi yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Tujuan berfungsi sebagai pedoman arah pembangunan jangka menengah lima tahunan, yang disusun berdasarkan visi dan misi serta mempertimbangkan hasil analisis strategis atas isu-isu utama di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Meskipun tidak selalu dirumuskan secara kuantitatif, tujuan harus merefleksikan capaian ideal yang menjadi orientasi pembangunan ke depan.



Tujuan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan guna merealisasikan misi organisasi. Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah periode 2025–2029, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan juga berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, serta mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah, kelompok sasaran yang dilayani, arah pembangunan organisasi, serta isu-isu strategis daerah di bidang PPPA dan KB. Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan untuk tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah: **Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga yg berkualitas** dengan indikator: 1) Indeks Ketimpangan Gender (IKG); 2) Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

3.2. Sasaran Renstra

Sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran terukur dari tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran jangka menengah yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan adalah:

- Sasaran 1: Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga yang berketahanan dan responsif gender, dengan indikator sasaran yaitu: 1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD; 2) Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak dan Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
- Sasaran 2: Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dengan indikator sasaran yaitu: 1) TFR; 2) Presenatse Peserta KB Aktif MKJP dan 3) *Unmeed Need*.
- Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran: 1) Nilai AKIP Perangkat Daerah; 2) Nilai IKM Perangkat Daerah dan 3) Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

NSPK dan SASARAN RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga yg berkualitas		1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,381	0,380-0,371	0,378 - 0,367	0,374 - 0,356	0,368 - 0,346	0,361 - 0,335	0,355 - 0,324
			2. Indeks Perlindungan Anak (IPA);	Indeks	60,69	60,93	61,17	61,41	61,64	61,88	62,12
			3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,94	62,63-63,37	63,43-63,49	64,18-64,27	64,92-65,04	65,67-65,82	66,42-66,59
		Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga yang berketahanan dan responsif gender	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	9,72	9,75	10	10,25	10,5	10,75	11
			Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio	0,59	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,40
			Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio (per 100.000 penduduk perempuan)	5,3	4,75	4	3,75	3,5	3	2,5
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan kualitas keluarga	TFR	%	2,21	2,16	2,14	2,12	2,10	2,08	2,06
			Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	Persen	78,01	78,05	78,10	78,15	78,20	78,25	78,30

NSPK dan SASARAN RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			<i>Unmet need</i>	Nilai	9,22	8,75	8,50	8,25	8,00	7,75	7,50
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (75,00)	BB (75,25)	BB (75,50)	BB (76,00)	BB (76,50)	BB (77,00)	BB (77,50)
			Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	B (77,78)	B (77,79)	B (77,80)	B (77,82)	B (77,85)	B (77,87)	B (77,90)
			Nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah.	Nilai	3,273	3,275	3,285	3,290	3,300	3,325	3,350

Agenda pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dibagi ke dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar penetapan target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat dilakukan secara lebih realistis, sekaligus memungkinkan pengukuran capaian pada setiap periodenya. Selain itu, penyusunan tahapan juga diperlukan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya yang terbatas, baik dari aspek anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana penunjang. Oleh karena itu, pencapaian prioritas dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 3.1 Pentahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

1. Tahun 2026: Penguatan Fondasi Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Layanan KB

Fokus diarahkan pada penguatan fondasi kesetaraan gender, perlindungan anak, dan layanan KB. Langkah operasional meliputi penguatan kelembagaan DP3AKB, peningkatan kapasitas SDM, serta advokasi kebijakan responsif gender. Pada tahap ini juga mendorong segera terbentuknya UPTD PPPA agar tersedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang lebih terintegrasi.

2. **Tahun 2027: Peningkatan Partisipasi Perempuan, Perlindungan Anak dan Akses Layanan KB yang Inklusif**

Tahap ini menitikberatkan pada peningkatan partisipasi perempuan, perlindungan anak, serta perluasan akses layanan KB yang inklusif. Operasionalisasi dilakukan dengan memperkuat jejaring dengan organisasi perempuan, PKK, Forum Anak, serta melakukan perluasan cakupan peserta KB aktif terutama di desa dan wilayah dengan akses layanan terbatas.

3. **Tahun 2028: Pemantapan Sistem Perlindungan Anak, Ketahanan Keluarga dan Inovasi Tata Kelola Layanan**

Prioritas diarahkan pada pemantapan sistem perlindungan anak, ketahanan keluarga, serta inovasi tata kelola layanan. Upaya ini mencakup optimalisasi mekanisme layanan berbasis masyarakat, penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan data, serta pengembangan model ketahanan keluarga melalui Kampung KB. Diharapkan pada tahun ini UPTD PPPA sudah terbentuk, sehingga dapat dilakukan penguatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana layanan.

4. **Tahun 2029: Akselerasi Pemberdayaan Perempuan, Optimalisasi Bonus Demografi dan Kolaborasi Pengendalian Penduduk**

Fokus pada akselerasi pemberdayaan perempuan, optimalisasi bonus demografi, dan kolaborasi pengendalian penduduk. Langkah operasional dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas remaja sebagai generasi produktif, serta integrasi lintas sektor dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan layanan KB.

5. **Tahun 2030: Terwujudnya Kesenjangan Gender, Kabupaten Layak Anak dan Pengendalian Penduduk Berkelanjutan**

Tahap akhir menargetkan terwujudnya kesetaraan gender, Kabupaten Layak Anak, serta pengendalian penduduk berkelanjutan. Kegiatan meliputi evaluasi capaian lima tahun, konsolidasi kelembagaan, replikasi praktik baik ke seluruh kecamatan, serta penguatan kemandirian masyarakat dalam perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk



mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan pemenuhan hak anak, Kabupaten Grobogan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan utama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan keluarga yang berketahanan dan responsif gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran pertama adalah *"Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak, serta tercapainya keluarga yang lebih tangguh, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan gender"*. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut ialah:

1. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan akses ekonomi berbasis gender inklusif.
2. Mengarusutamakan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
3. Mengembangkan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga berbasis masyarakat melalui pendekatan life cycle dan partisipatif.
4. Memperkuat kelembagaan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA, P2TP2A, SAPA).
5. Mendorong sinergi multipihak (pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, masyarakat) dalam sistem perlindungan.
6. Meningkatkan cakupan wilayah dan kualitas pelayanan DRPPA serta memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan.

Dengan arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik;
2. Penguatan model ketahanan keluarga melalui pemberdayaan berbasis komunitas dan pengarusutamaan gender;
3. Penguatan sistem layanan perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi dan responsif;
4. Perluasan cakupan dan penguatan kelembagaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Untuk mencapai sasaran kedua yaitu *"Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk"*. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut ialah:

1. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk dan penundaan usia perkawinan.



2. Mengoptimalkan pengembangan sistem KIE tentang kependudukan yang terpadu berbasis satuan pendidikan dan komunitas
3. Perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB yang ramah perempuan dan inklusif.
4. Penguatan promosi dan edukasi penggunaan kontrasepsi modern dan kesadaran kesehatan reproduksi.

Tabel 3.2

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

NSPK/ Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga yg berkualitas	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga yang berketahanan dan responsif gender.	1. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan akses ekonomi berbasis gender inklusif.	Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada	1. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik.
			2. Mengarusutamakan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.		2. Penguatan model ketahanan keluarga melalui pemberdayaan berbasis komunitas dan pengarusutamaan gender
			3. Mengembangkan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga berbasis masyarakat melalui pendekatan life cycle dan partisipatif.		3. Penguatan sistem layanan perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi dan responsif.
			4. 4. Memperkuat kelembagaan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA, P2TP2A, SAPA).		4. Perluasan cakupan dan penguatan kelembagaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
			5. Mendorong sinergi multipihak (pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, masyarakat) dalam sistem perlindungan.		
			6. Meningkatkan cakupan wilayah dan kualitas pelayanan DRPPA serta memperkuat peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan.		



NSPK/ Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam edukasi dan layanan perencanaan kehidupan keluarga dan pendewasaan usia perkawinan.	Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana	1. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian penduduk dan penundaan usia perkawinan.
			2. Mengembangkan sistem Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kependudukan yang terpadu dan berbasis satuan pendidikan dan komunitas		2. Mengoptimalkan pengembangan sistem KIE tentang kependudukan yang terpadu berbasis satuan pendidikan dan komunitas
			3. Meningkatkan akses dan kualitas layanan KB ramah perempuan di seluruh fasilitas kesehatan.		3. Perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan KB yang ramah perempuan dan inklusif.
			4. Memperluas cakupan peserta KB aktif, khususnya kelompok rentan dan wilayah sulit dijangkau.		4. Penguatan promosi dan edukasi penggunaan kontrasepsi modern dan kesadaran kesehatan reproduksi.
			5. Meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang KB, kesehatan reproduksi, dan kontrasepsi modern.		



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui sebagaimana dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan target kinerja dan alokasi anggaran berlaku untuk periode 2026–2030. Adapun program Tahun 2025 telah tercantum dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak dimasukkan kembali ke dalam Renstra. Secara khusus, program Tahun 2030 diposisikan sebagai pijakan utama penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2030. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2030 memiliki peran strategis sebagai titik transisi sekaligus landasan keberlanjutan pembangunan pada periode berikutnya. Hal ini diharapkan mampu menjamin kesinambungan kebijakan, konsistensi program, serta keberlanjutan capaian kinerja pembangunan yang akan datang. Program, Kegiatan, Subkegiatan selama kurun waktu tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

1. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**, dengan kegiatan:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota;
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:



- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - 2) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.
2. **Program Perlindungan Perempuan**, dengan kegiatan:
- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
 - 2) Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
3. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**, dengan kegiatan:
- a. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penguatan Kerjasama antar Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 2) Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.



4. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**, dengan kegiatan:
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
5. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**, dengan kegiatan:
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2) Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
6. **Program Perlindungan Khusus Anak**, dengan sub kegiatan meliputi:
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, melalui sub kegiatan: Penyusunan kebijakan Pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/ Kota.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota;
7. **Program Pengendalian Penduduk**, terdiri dari kegiatan meliputi:
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga;
 - 2) Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota, melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;



- 2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- 3) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga;
- 4) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB;
- 5) Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain.

8. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**, terdiri dari kegiatan:

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian Program KKBPK;
 - 2) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana;
 - 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);
 - 4) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
 - 5) Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), melalui sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB;
 - 2) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - 3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
 - 4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;



- 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 6) Peningkatan Kesertaan KB Pria.
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas;
 - 2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.
9. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL;
 - 2) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - 3) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - 4) Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - 5) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
 - b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);
 - 2) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita);



- 3) Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga;
 - 4) Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga.
 - c. Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), melalui sub kegiatan: Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja
- 10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:**
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Sasaran RPJMD: • Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan • Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta keluarga yg berkualitas				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
					Indeks Perlindungan Anak (IPA);	
					Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	
		Sasaran 1: Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak serta penguatan keluarga yang berketahanan dan responsif gender			1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	
					2. Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	
					3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam struktur organisasi	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaa PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya perempuan yang mendapat fasilitas	Persentase perempuan yang mendapat fasilitas	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				pengembangan kapasitas	pengembangan kapasitas	dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
				Meningkatnya LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) yang aktif	Persentase LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) yang aktif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan			
					Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Program Perlindungan Perempuan
				Meningkatnya Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terpenuhinya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota
				Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
				TerlaksananyaPenguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak		Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
				Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penguatan Kerjasama antar Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dan	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Penguatan Kerjasama antar Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Lintas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Terlaksananya Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya pemanfaatan Data Gender dan Anak		Persentase Ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di Tingkat Daerah Kab/Kota	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
				Meningkatnya kualitas data, kelengkapan data, kepastian data, dan penggunaan data.	Persentase data yang memenuhi standar kualitas	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak
			Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif		Persentase Desa/Kelurahan yang Layak Anak (DEKELA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				Meningkatnya lembaga yang terlibat dalam pelebagaan dan implementasi PHA	Persentase lembaga yang terlibat dalam pelebagaan dan implementasi PHA	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlksnananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya peran Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi anak.	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi anak.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan		Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Meningkatnya peran pemerintah daerah, sekolah, lembaga	Persentase Lembaga yang aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			perlakuan salah lainnya terhadap anak	swadaya masyarakat, dan masyarakat luas dalam pencegahan kekerasan terhadap anak		Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota
				Meningkatnya peran Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif dalam memberikan layanan.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota
		Sasaran 2: Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk		1. TFR	
					2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	
					3. Unmet need	
					ASFR 15-19 Tahun	Program Pengendalian Penduduk
				Meningkatnya efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Terpenuhinya Program Bangga Kencana Kabupaten/Kota	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Kuantitas Penduduk
				Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
				Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
				Meningkatnya informasi tentang Keluarga Berencana (KB), Pembangunan, dan Keluarga (KKBP) yang disebarkan kepada masyarakat	Persentase tersedianya Pengelohan Data dan Pelaporan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
				Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
				Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Program Bangga Kencana di Sektor Lain
			Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana Secara Menyeluruh		Persentase KB Aktif	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB, serta penerimaan terhadap program KB, termasuk di kalangan pemuka masyarakat dan agama	Persentase penduduk yang terdampak Program Bangga Kencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
				Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK
				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
				Terlaksananya mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Lokakarya (Minilok)	
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
				Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
				Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang KB di masyarakat	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
				Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
				Meningkatnya ketersediaan dan efektivitas pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di	Persentase tersalurnya alokon dan sarana penunjang alokon ke fasilitas kesehatan pelayanan KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				fasilitas kesehatan .		
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
				Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	Peningkatan Kesertaan KB Pria
				Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB melalui kegiatan Ormas.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) mandiri	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
			Terwujudnya keberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				Meningkatnya kemandirian, ketentraman, dan kebahagiaan keluarga	Indeks Lansia Berdaya	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Terlaksananya Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
				Meningkatnya partisipasi Ormas dalam program. Pembangunan	Persentase Ormas yang aktif dalam program Pembangunan keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Keluarga		Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)
				Terlaksananya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Pembangunan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
				Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif terkait perencanaan kehidupan berkeluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah	Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)
				Terlaksananya	Jumlah Kelompok Kegiatan	Pembinaan Perencanaan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja
		Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			1. Nilai Sakip Perangkat Daerah	
					2. Nilai IKM Perangkat daerah	
					3. Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	
			Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah		1. Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					2. Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	
					3. Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	
				Terpenuhinya kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terpenuhinya dokumen administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi BMD Perangkat Daerah	01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	01.2.03.0006 Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD
				Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
					Disediakan	
				Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/ Material
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Standart yang ditetapkan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	01.2.08.0004 Penyediaan Jasa



NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	01.2.09.0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah	%	9,72	10,00	650.000.000	10,25	650.000.000	10,50	650.000.000	10,75	650.000.000	11,00	650.000.000	11,00	3.250.000.000
Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab / Kota	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Persentase perempuan dalam struktur organisasi	%	2,79	2,80	170.000.000	2,82	170.000.000	2,83	170.000.000	2,85	170.000.000	2,87	170.000.000	2,87	850.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	4	170.000.000	4	170.000.000	4	170.000.000	4	170.000.000	4	170.000.000	20	850.000.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi, peningkatan produktivitas perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam pembangunan, dan peningkatan kesadaran	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi pengembangan kapasitas	%	30	40	340.000.000	60	340.000.000	80	340.000.000	90	340.000.000	100	340.000.000	100	1.700.000.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	masyarakat akan pentingnya peran perempuan.															
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Organisasi	3	2	140.00 0.000	2	140.000 .000	2	140.000 .000	2	140.0 00.00 0	2	140.00 0.000		
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	350	450	200.00 0.000	450	200.000 .000	450	200.000 .000	450	200.0 00.00 0	450	200.00 0.000		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberda yaan Perempuan) yang aktif	Persentase LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) yang aktif	%	70	71	140.000. 000	73	140.000. 000	74	140.000. 000	76	140.00 0.000	78	140.00 0.000	100	700.000.0 00
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendamping an penguatan dan pengem bangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1	1	70.000. 000	1	70.000. 000	1	70.000. 000	1	70.00 0.000	1	70.000 .000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/ Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	2	2	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	7.727.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	87.727.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Persen	100	100	0	100	4.000.000	100	2.727.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	14.727.000
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab / Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Perangkat Daerah	30	30	0	30	4.000.000	30	2.727.000	30	4.000.000	30	4.000.000		
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Terpenuhinya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan rujukan lanjutan.	%	100	100	0	100	8.000.000	100	2.500.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	26.500.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kab / Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	30	8.000.000	30	2.500.000	30	8.000.000	30	8.000.000		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%	30	40	20.000.000	60	8.000.000	80	2.500.000	90	8.000.000	100	8.000.000	100	46.500.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	0	2	4.000.000	2	1.250.000	2	4.000.000	2	4.000.000		
Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	TerlaksananyaPenguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1	1	20.000.000	1	4.000.000	1	1.250.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta	Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak	%	14.29	15.63	97.500.000	16.37	97.500.000	17.11	97.500.000	17.86	97.500.000	18.60	97.500.000	18.60	487.500.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	perlindungan perempuan dan anak	Sesuai Standar.	%													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas	%	30	40	97.500.000	60	97.500.000	80	97.500.000	90	97.500.000	100	97.500.000	100	487.500.000
Penguatan Kerjasama antar Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Kerjasama antar Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Tingkat Daerah Kab / Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen				2	97.500.000	2	97.500.000	2	97.500.000	2	97.500.000		
Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	2	2	97.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan Data Gender dan Anak	Persentase Ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di Tingkat Daerah Kab/Kota	%	60,42	64,58	70.000.000	66,67	70.000.000	68,75	70.000.000	70,89	70.000.000	72,92	70.000.000	72,92	350.000.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	Meningkatnya kualitas data, kelengkapan data, kepastian data, dan penggunaan data.	Persentase data yang memenuhi standar kualitas	%	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	350.000.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Lembaga	30	40	70.000.000	50	70.000.000	52	70.000.000	54	70.000.000	55	70.000.000		350.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase Desa/Kelurahan yang Layak Anak (DEKELA)	%	59,29	75	425.356.000	82,86	425.356.000	90,71	425.356.000	98,57	433.863.120	100	442.540.382	100	2.152.471.502
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab / Kota	Meningkatnya lembaga yang terlibat dalam pelembagaan dan implementasi PHA	Persentase lembaga yang terlibat dalam pelembagaan dan implementasi PHA	%	75	78	225.718.600	82,86	225.718.600	90,71	225.718.600	98,57	225.718.600	100	225.718.600	100	1.128.593.000
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	40	225.718.600	60	225.718.600	80	225.718.600	90	225.718.600	100	225.718.600		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya peran Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi anak.	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi anak.	%	76	76	199.63 7.400	77	199.63 7.400	78	199.63 7.400	79	208.1 44.52 0	80	216.8 21.78 2	100	1.023.878. 502
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	20	40	50.285. 000	40	50.285. 000	40	50.285. 000	40	62.79 2.120	40	67.569 .382		
Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerja sama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	149.35 2.400	2	149.352 .400	2	149.352 .400	2	145.3 52.40 0	2	149.25 2.400		
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif	%	100	100	-	100	100.000. 000	100	100.000. 000	100	100.00 0.000	100	100.00 0.000	100	400.000.0 00



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya lembaga yang aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Persentase Lembaga yang aktif dalam pencegaha kekerasan terhadap anak.	%	20	25	0	30	80.000.000	35	80.000.000	40	80.000.000	45	80.000.000	100	320.000.000
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/Kota	Tersedianya kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Kebijakan	1	0	0	1	80.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif dalam memberikan layanan.	%	100	100	0	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/ kota	Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	N/A	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	ASFR 15-19 Tahun	%	18,02	17,55	622.340.200	16,75	622.340.200	16,25	622.340.200	16,00	634.787.004	15,75	647.482.744	15,75	3.149.290.348
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya efiktifitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Persentase Terpenuhinya Program Bangsa Kencana Kabupaten/Kota	%	100	100	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kegiatan	1	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000
Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab/Kota	Dokumen	1	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi tentang Keluarga Berencana (KB), Pembangunan keluarga , dan Kependudukan (KKBPk) yang disebarkan kepada masyarakat	Persentase tersedianya Pengelohan Data dan Pelaporan	%	100	100	622.340.200	100	522.340.200	100	522.340.200	100	534.787.004	100	547.482.744	100	2.749.290.348
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	TerlaksananyaPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	1	57.816.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	2	2	282.000.000	2	186.086.000	2	186.086.000	2	192.000.000	2	198.000.000		186.000.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelavanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelavanan KB	Dokumen	3	3	282.524.200	3	186.254.200	3	186.254.200	3	192.787.004	3	199.482.744		186.254.200



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	10	0	0	98	50.000.000	105	50.000.000	110	50.000.000	115	50.000.000		50.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana Secara Menyeluruh	Persentase KB Aktif	%	78,01	78,50	5.855.706.800	78,75	5.855.706.800	78,85	5.855.706.800	78,90	5.972.820.936	78,95	6.092.277.355	78,95	29.632.218.691
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB, serta penerimaan terhadap program KB, termasuk di kalangan pemuka masyarakat dan agama	Persentase penduduk yang terdampak Program Bangga Kencana	%	25	28	1.225.707.000	30	1.225.707.000	32	1.225.707.000	34	1.340.000.000	36	1.340.000.000	100	6.357.121.000
Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	10	10	459.420.000	10	359.420.000	10	359.420.000	10	450.000.000	10	450.000.000	50	2.078.260.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	10	10	377.340.000	10	377.340.000	10	377.340.000	10	400.000.000	10	400.000.000	50	1.932.020.000
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2	2	139.427.000	2	139.427.000	2	139.427.000	2	140.000.000	2	140.000.000	10	698.281.000
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	12	12	249.520.000	47	249.520.000	47	249.520.000	47	250.000.000	47	250.000.000	200	1.248.560.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang KB di masyarakat	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	%	65	70	1.260.000.000	73	1.260.000.000	75	1.260.000.000	79	1.260.000.000	83	1.356.247.355	100	6.396.247.355



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	N/A	-	-	19	200.000.000,00	19	200.000.000,00	19	200.000.000,00	19	200.000.000,00		-
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	350	400	1.260.000.000	400	1.060.000.000	400	1.060.000.000	400	1.060.000.000	400	1.156.247.355		1.260.000.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya ketersediaan dan efektivitas pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan	Persentase tersalurnya alokon dan sarana penunjang alokon ke fasilitas kesehatan pelayanan KB	%	100	100	2.969.469.800	100	2.969.469.800	100	2.969.469.800	100	2.972.290.936	100	2.995.500.000	100	14.876.200.336
PengendalianPendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	10	10	85.500.000	10	85.500.000	10	85.500.000	10	85.500.000	10	85.500.000		85.500.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	4034	5463	2.832.631.800	5465	2.532.631.800	5470	2.532.631.800	5475	2.532.631.800	5475	2.555.000.000	6275	2.832.631.800
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	N/A	-	-	19	100.000.000	27	100.000.000	36	100.000.000	45	100.000.000		-



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	2	51.338.000	2	51.338.000	2	51.338.000	2	54.159.136	2	55.000.000		51.338.000
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	0	0	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000		0
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	0	0	0	8	100.000.000	10	100.000.000	12	100.000.000	14	100.000.000		0
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KB melalui kegiatan Ormas.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) mandiri	%	12,14	14,1	400.530.000	15	400.530.000	15,8	400.530.000	15,6	400.530.000	15,6	400.530.000	15,6	2.002.650.000
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit				19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000		



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangun- an Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	76	79	400.53 0.000	82	300.530 .000	85	300.530 .000	87	300.5 30.00 0	90	300.53 0.000		400.530.00 0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terwujudnya keberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA)	%	74	74,10	7.637.36 3.000	74,15	7.637.36 3.000	74,20	7.637.36 3.000	74,25	7.790. 110.26 0	74,30	7.945.9 12.465	74,30	38.648.11 1.725
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kemandirian, ketentraman, dan kebahagiaan keluarga dan meningkatnya ketangguhan lansia.	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	59,8	60,2	214.607. 000	60,6	265.000. 000	61.0	265.000. 000	61.4	315.00 0.000	61.8	366.00 0.000	61.8	1.364.607. 000
Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan				2	50.000. 000	2	50.000. 000	2	50.00 0.000	2	100.00 0.000		250.000.00 0
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	10	10	19.200. 000	16	20.000. 000	16	20.000. 000	16	20.00 0.000	16	20.000 .000		99.200.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	10	10	130.00 0.000	20	130.000 .000	20	130.000 .000	20	130.0 00.00 0	20	150.00 0.000		670.000.00 0
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	100	180	35.201. 000	180	35.000. 000	180	35.000. 000	180	35.00 0.000	180	35.000 .000		175.201.00 0
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberda yaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	1	1	30.206. 000	1	30.000. 000	1	30.000. 000	1	30.00 0.000	1	50.000 .000		170.206.00 0
Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang				100	50.000. 000	100	50.000. 000	100	50.00 0.000	100	50.000 .000		200.000.00 0



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya partisipasi Ormas dalam Program Pembangunan Keluarga	Persentase Ormas yang aktif dalam program pembangunan keluarga	%	39,52	41,13	7.422.75 6.000	42,74	7.322.36 3.000	44,35	7.322.36 3.000	45,97	7.475. 110.26 0	48,39	7.540.9 12.465	48,39	37.083.50 4.725
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	10	10	3.360.0 00.000	10	3.242.3 63.000	10	3.242.3 63.000	10	3.395. 110.2 60	10	3.440. 912.46 5		16.680.748. 725
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Keluarga	10 Laporan / 2.380 keluarga	10 Lapora n / 2.380 keluar ga	4.032.0 00.000	10 Lapora n / 2.380 keluar ga	4.000.0 00.000	10 Lapora n / 2.380 keluar ga	4.000.0 00.000	10 Lapora n / 2.380 keluar ga	4.000. 000.0 00	10 Lapor an / 2.380 kelua rga	4.000. 000.00 0		16.032.000. 000
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasya rakatan dalam penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	3	3	30.756. 000	3	30.000. 000	3	30.000. 000	3	30.00 0.000	3	50.000 .000		120.756.00 0



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Pembangunan Kelurarga	Laporan	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		150.000.000
Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku positif terkait perencanaan kehidupan berkeluarga	Persentase Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan pernikahan	%	7%	15%	0	22%	50.000.000	29%	50.000.000	37%	50.000.000	44%	50.000.000	44%	200.000.000
Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Kelompok	0	0		19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000		150.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standart Akuntansi Pemerintah	%	100	100	6.765.764.000	100	5.852.476.000	100	6.178.037.000	100	6.303.597.740	100	6.431.669.695	100	31.531.544.435
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100		100		100		100					
		Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Risiko	%	100	100		100		100		100					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	10.514.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.514.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	3	3	10.514.	3	10.000.	3	10.000.	3	10.00	3	10.000		50.514.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Daerah	Daerah	Daerah				000		000		000		0.000		.000		0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	4.518.21 0.000	100	4.300.00 0.000	100	4.300.00 0.000	100	4.400. 000.00 0	100	4.450.0 00.000	100	21.968.21 0.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	27	30	4.518.2 10.000	30	4.300.0 00.000	30	4.300.0 00.000	30	4.400. 000.0 00	30	4.450. 000.00 0		21.968.21 0.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi Adminitrasi barang Milik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	100	9.351.3 00	100	9.000.0 00	100	9.000.0 00	100	9.000 .000	100	9.000. 000	100	45.351.30 0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	9.351.3 00	2	9.000.0 00	2	9.000.0 00	2	9.000. 000	2	9.000. 000		45.351.30 0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	662.510. 000	100	461.008. 000	100	587.529. 000	100	613.08 9.740	100	551.16 1.695	100	2.875.298. 435
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	-	30	100.000 .000	30	100.000 .000	30	100.0 00.00 0	30	100.00 0.000		400.000.0 00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	11	662.51 0.000	11	311.008 .000	11	437.529 .000	11	463.0 89.74 0	11	401.16 1.695		2.275.298. 435
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang	0	0	0	2	25.000. 000	2	25.000. 000	2	25.00 0.000	2	25.000 .000		100.000.0 00



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Fungsi	Pelatihan														
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000		100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	536.874.000	100	506.573.000	100	506.573.000	100	506.573.000	100	546.573.000	100	2.603.166.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	8.173.000	10	8.173.000	10	8.173.000	10	8.173.000	10	8.173.000		40.865.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	97.264.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000		457.264.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	46.696.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000		206.696.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	8.400.000	3	8.400.000	3	8.400.000	3	8.400.000	3	8.400.000		42.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	46.265.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		206.265.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	330.076.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	340.000.000		1.570.076.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	0	-	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		40.000.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	N/A	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		40.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Standart yang ditetapkan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	110.379.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	510.379.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	10	110.379.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		510.379.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	196.161.500	100	193.960.000	100	193.000.000	100	193.000.000	100	193.000.000	100	969.121.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	3.960.000	12	3.960.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000		16.920.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	170.478.500	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000	12	170.000.000		850.478.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	21.723.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		101.723.000



BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	721.764.200	100	271.935.000	100	471.935.000	100	471.935.000	100	571.935.000	100	2.509.504.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	56.300.000	2	56.300.000	2	56.300.000	2	56.300.000	2	56.300.000	2	281.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	65.635.000	5	65.635.000	5	65.635.000	5	65.635.000	5	65.635.000	5	328.175.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3	546.493.200	2	100.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	400.000.000		1.646.493.200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3	53.336.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000		253.336.000



Daftar sub kegiatan dalam mencapai kinerja Program Prioritas/Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan Periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	Program Tematik: Pencegahan perkawinan usia anak dan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	• Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota • Sub Kegiatan : - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi; - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Meningkatnya kualitas layanan terhadap perempuan korban kekerasan	• Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; • Sub Kegiatan: Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	• Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; • Sub Kegiatan: Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana Secara Menyeluruh	• Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal • Sub Kegiatan: - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana; - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
			• Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
			- Sub Kegiatan: - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB; - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Terwujudnya Keberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	- Kegiatan: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; - Sub Kegiatan: Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Grobogan Tahun 2025-2029 tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

No	Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,381	0,380-0,371	0,378 - 0,367	0,374 - 0,356	0,368 - 0,346	0,361 - 0,335	0,355 - 0,324
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	60,69	60,93	61,17	61,41	61,64	61,88	62,12
3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	61,94	62,63-63,37	63,43-63,49	64,18-64,27	64,92-65,04	65,67-65,82	66,42-66,59

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,72	9,75	10	10,25	10,5	10,75	11
2	Rasio kekerasan terhadap anak per	N/A	0,59	0,56	0,52	0,49	0,46	0,43	0,40



No	Indikator	Satuan	2024 (Baseline)	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	10.000 anak								
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	N/A	5,3	4,75	4	3,75	3,5	3	2,5
4	TFR	%	2,21	2,16	2,14	2,12	2,10	2,08	2,06
5	Presenatse pemakaian kontrasepsi Modern	%	78,01	78,05	78,10	78,15	78,20	78,25	78,30
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,22	8,75	8,50	8,25	8,00	7,75	7,50

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Substansial

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, dengan visi pembangunan daerah **“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara efektif, efisien, dan terukur mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan.

5.2. Kesimpulan Sesuai Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan renstra, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Dokumen ini digunakan sebagai dasar pengajuan pendanaan melalui RAPBD periode 2025-2029, dan tahun 2030 yang berfungsi sebagai masa transisi guna memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
2. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dijadikan pedoman untuk menetapkan perjanjian kinerja serta menyusun laporan kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan pada periode 2025-2029.
3. Bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diharapkan mendukung pencapaian target indikator kinerja dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum pada Renstra Dinas

- emberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dengan sebaik-baiknya.
4. Jika terdapat perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah serta di Kabupaten Grobogan, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
 6. Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2030.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus menjamin tercapainya target Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, serta tahun 2030 sebagai masa transisi, diperlukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil dari program dan kegiatan yang dijalankan.

Pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi Renstra dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh seluruh jajaran di lingkungan instansi yang bekerja secara kolektif untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan, sehingga arah pembangunan senantiasa selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dokumen ini juga bersifat dinamis, memungkinkan adanya revisi dan penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam

perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi panduan kerja tetapi juga alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat tercapai dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, Kolaborasi lintas sektor dengan unsur pentahelix menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen renstra ini juga bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk dilakukan penyesuaian, revisi maupun penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi panduan kerja tetapi juga alat evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan pengendalian risiko strategis perangkat daerah agar setiap potensi hambatan dapat diantisipasi sejak dini. Selain itu, evaluasi Renstra perangkat daerah perlu dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode lima tahun, sehingga pencapaian sasaran dapat diukur, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat tercapai apabila didukung oleh berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan unsur pentahelix, pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, serta media menjadi kunci keberhasilan dalam merealisasikan tujuan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Sebagai penutup, dokumen renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh dalam penyusunan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan. Dengan arahan dan tujuan yang jelas, renstra ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirancang Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.